

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

ALVIN ARIGHI
NPM : 157110691

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2020**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Alvin Arighi
NPM : 157110691
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru Tahun 2018

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 15 April 2020

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Pembimbing

Hendry Andry, S.Sos., M. Si.

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Alvin Arighi
NPM : 157110691
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru Tahun 2018

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 15 April 2020

Ketua,

Sekretaris,

Hendry Andry, S.Sos., M. Si.

Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Anggota

. Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 07 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini Kamis 09 April 2020 jam 09.00 – 10.00 bertempat diruang rapat Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konferehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Alvin Arighi
NPM : 157110691
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018
Nilai Ujian : Angka: “ “ ; Huruf: “ “
Keputusan Hasil Ujian : Lulus/ Tidak Lulus/ Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hendry Andry, S. Sos., M.Si.	Ketua	1.
2.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.	Anggota	3.
4.	Eko Handrian S.Sos., M.Si.	Notulen	4.

Pekanbaru, 15 April 2020
Dekan

Dr. H. Moris A. Yogia, M.Si.

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alvin Arighi
NPM : 157110691
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru Tahun 2018

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 15 April 2020

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Hendry Andry, S.Sos., M. Si.

Drs. Syapril Abdullah, M.Si.

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I,

Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Hendry Andry, S.Sos., M. Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT ,atas segala rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak yang membantu. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si., selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry AndryS.Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar kepada penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Seluruh staff, Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

6. Kepada Ayah dan Ibu yang sangat saya cintai yang telah berjasa membersarkan, membimbing, serta senantiasa mendoakan ananda untuk keberhasilan dalam menyelesaikan studi ini. Juga kepada abang dan adik-adik tersayang serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam setiap langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
7. Kepada teman-teman serta sahabat-sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah dan khilaf.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Pekanbaru, Juni 2019

Alvin Arighi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN **TIM**
PEMBIMBING

.....

i

PERSETUJUAN **TIM**
PENGUJI

.....

ii

BERITA **ACARA** **UJIAN** **KONFERHENSIF**
SKRIPSI

.....

iii

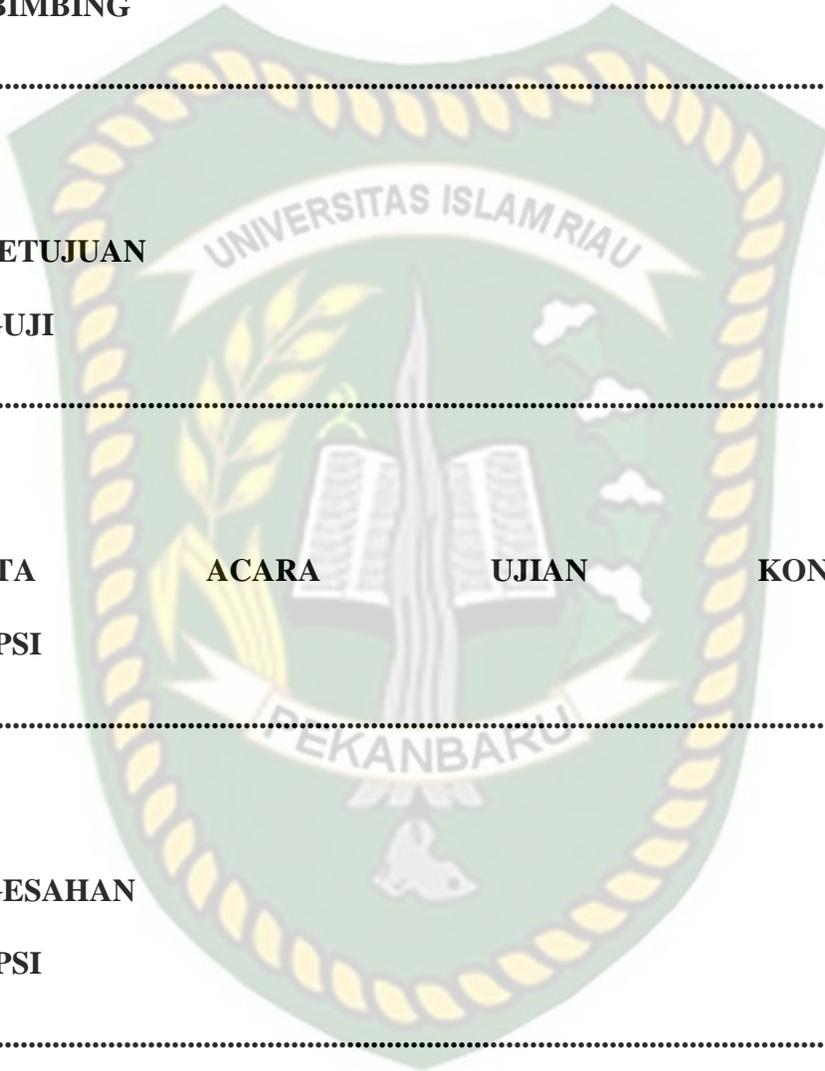
PENGESAHAN
SKRIPSI

.....

iv

KATA

PENGANTAR



.....

v

DAFTAR

ISI

.....

vii

DAFTAR

TABEL

.....

xi

DAFTAR

GAMBAR

.....

xv

DAFTAR

LAMPIRAN

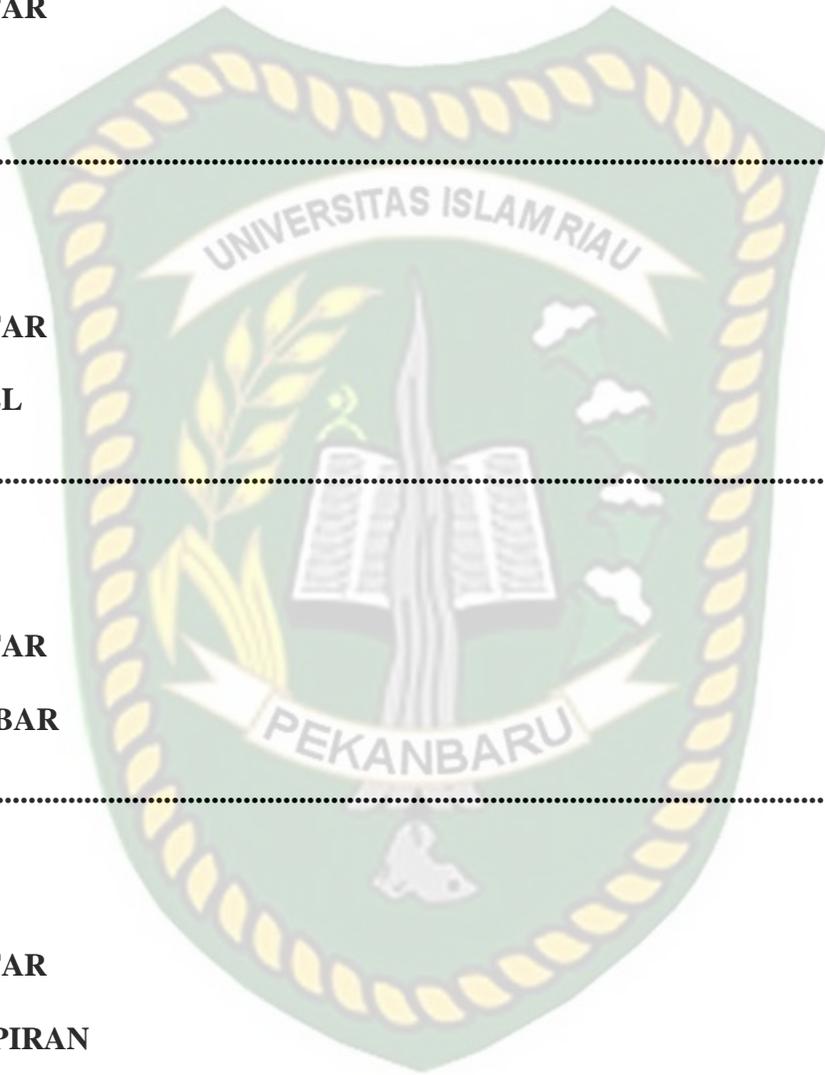
.....

xvi

PERNYATAAN

KEASLIAN

NASKAH



.....

xvii

ABSTRAK

.....

xviii

ABSTRACT

.....

xix

BAB I

PENDAHULUAN

.....

1

A. Latar Belakang

Masalah

.....

1

B. Rumusan Masalah

Masalah

.....

14

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

14

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

16

A. Studi
Kepustakaan

16

1. Konsep
Administrasi

16

2. Konsep
Organisasi

18

3. Konsep

Manajemen

19

4. Evaluasi

22

5. Pelaksanaan

26

6. Musyawarah
(Musrenbang)

Perencanaan

Pembangunan

30

7. Admintrasi

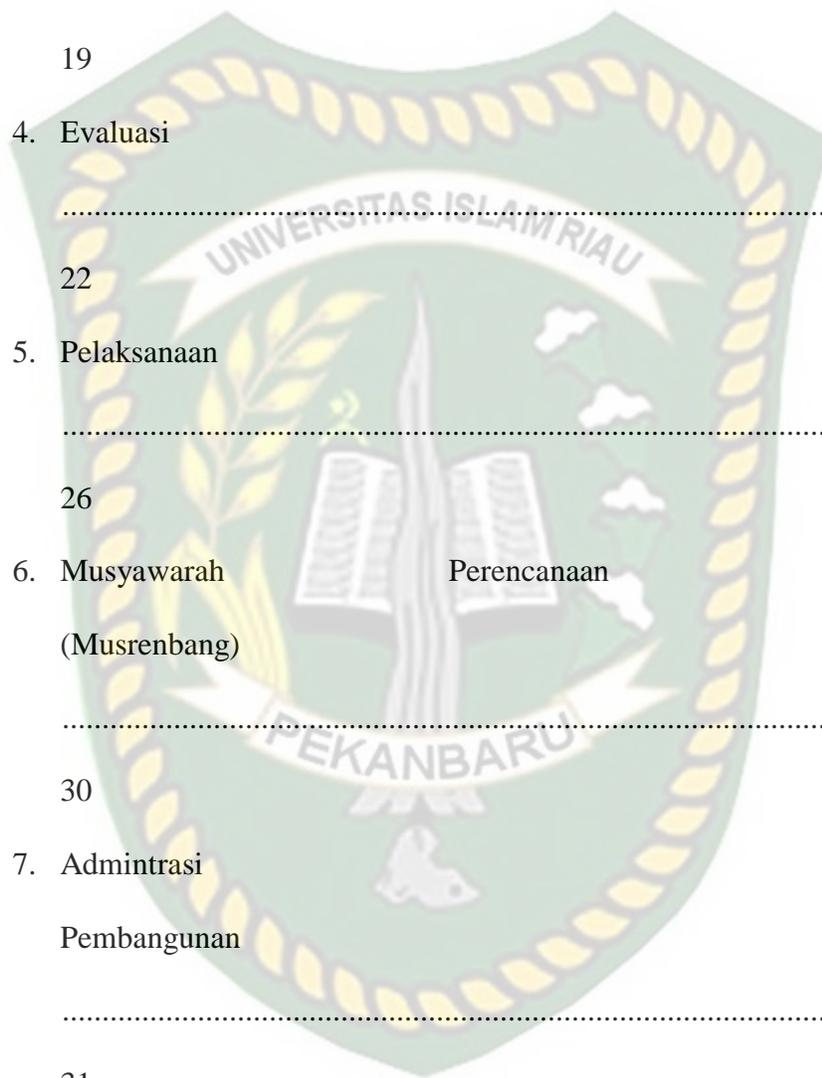
Pembangunan

31

8. Teori

Partisipasi

32



9. Perencanaan

Pembangunan

.....
34

B. Kerangka

Pikir

.....
40

C. Konsep

Operasional

.....
42

D. Operasional

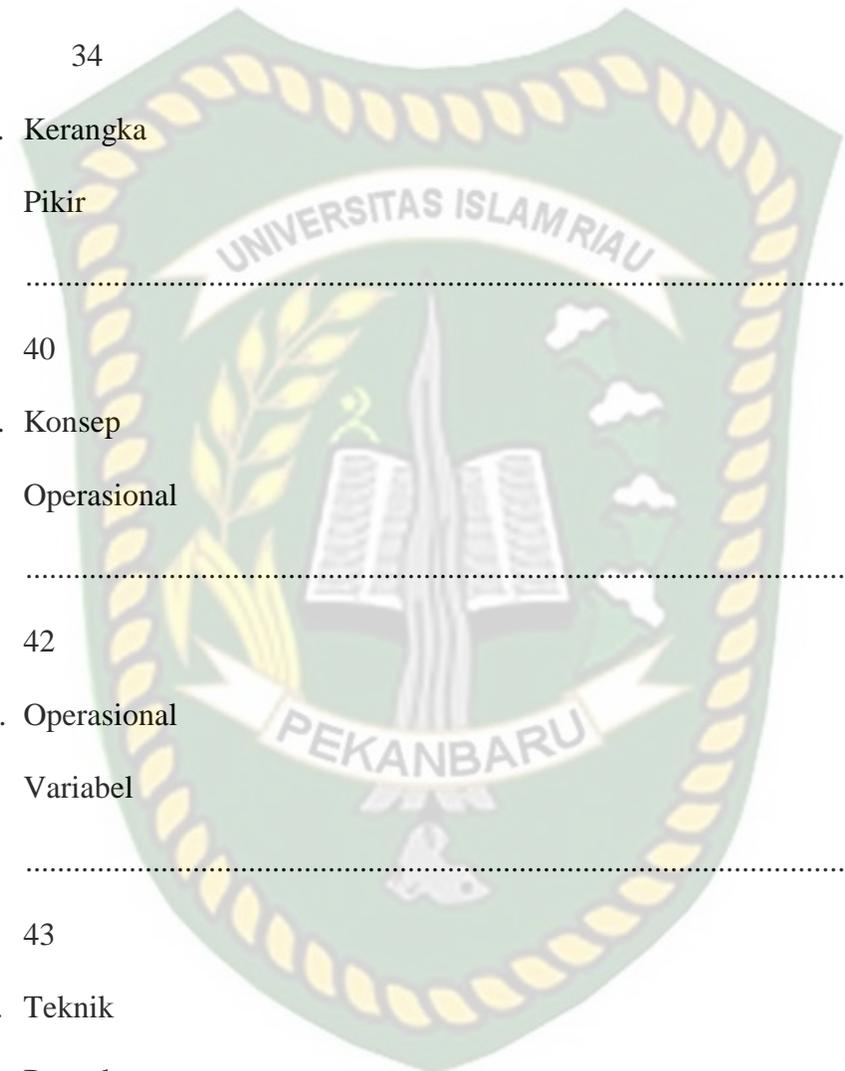
Variabel

.....
43

E. Teknik

Pengukuran

.....
46



PENELITIAN

.....
50

A. Tipe
Penelitian

.....
50

B. Lokasi
Penelitian

.....
50

C. Populasi
Sampel

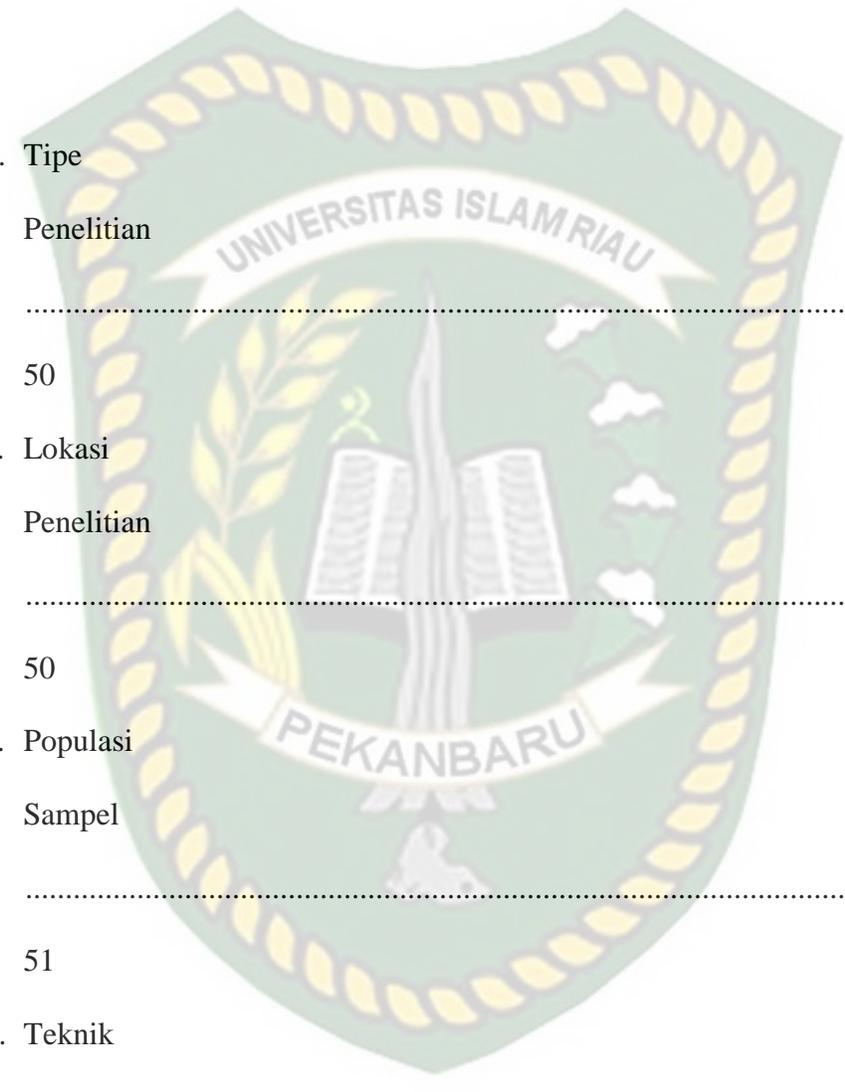
dan

.....
51

D. Teknik
Sampel

Penarikan

.....
52



E. Jenis dan Sumber
Data

.....
53

F. Teknik Pengumpulan
Data

.....
54

G. Teknik Analisis Data dan Uji
Hipotesis

.....
55

H. Jadwal
Penelitian

.....
56

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah

Ringkas

.....
57

B. Struktur

Organisasi

64

C. Fungsi dan Tugas

Organisasi

67

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

77

A. Identitas

Responden

77

B. Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Tahun

2018

82

C. Rekapitulasi dari Indikator-Indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru Tahun
2018

99

D. Hambatan dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru

104

BAB

VI

PENUTUP

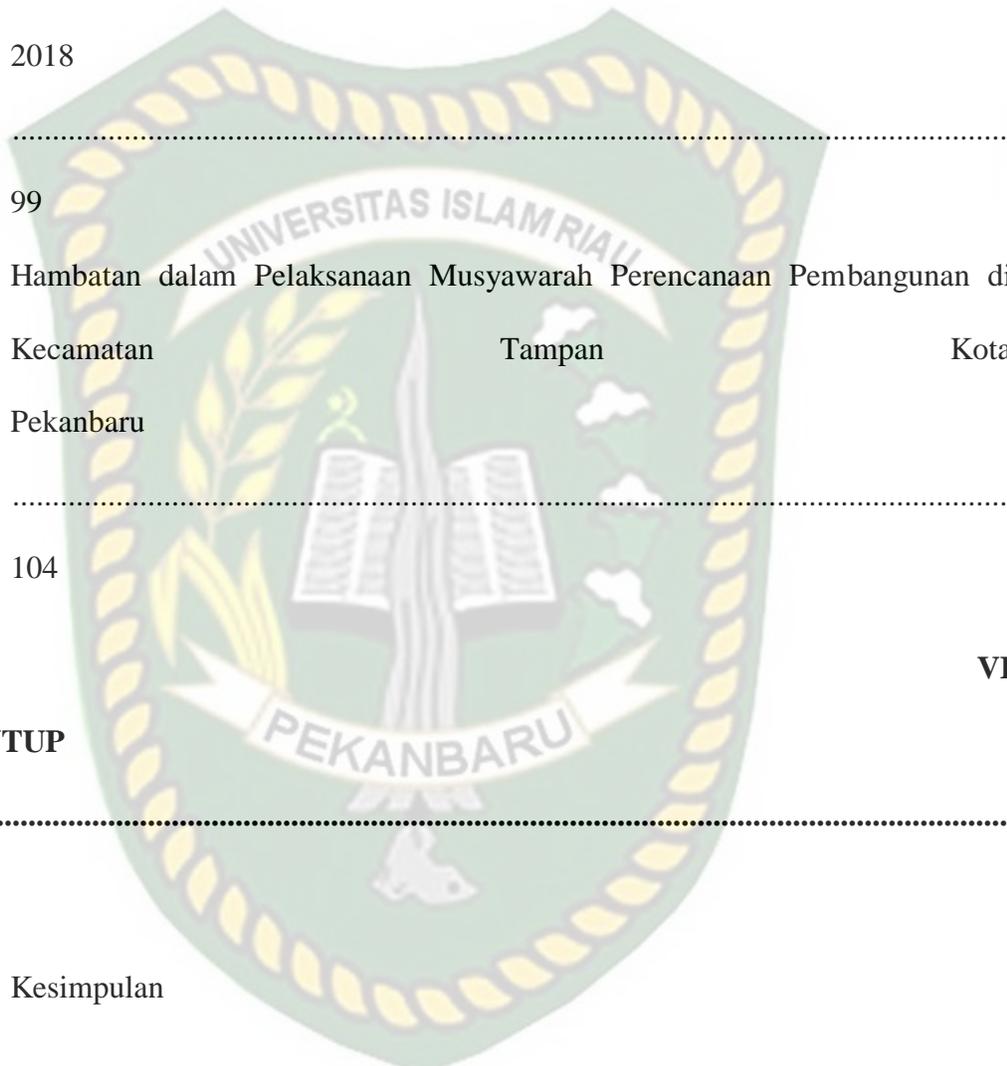
105

A. Kesimpulan

105

B. Saran

106



DAFTAR

PUSTAKA

107



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

I.1	Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Menurut Musrenbang Kecamatan, di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru pada Tahun 2018.....	9
I.2	Daftar Urutan Kegiatan Prioritas di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	10
I.3	Daftar Urutan Kegiatan Prioritas yang Terealisasi di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2019.....	11
I.4	Daftar Partisipan Kecamatan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	12
I.5	Daftar Narasumber Musrenbang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	13

II.1 Operasuioanl Variabel Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru Tahun 2018	4
4	
III.1 Daftar Responden Penelitian.....	51
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	56
IV.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2016	58
IV.2 Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016	60
V.1 Distribusi Jumlah Responden Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur.....	78
V.2 Distribusi Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamtan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan umur.....	78
V.3 Identitas Responden Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.....	79
V.4 Identitas Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80

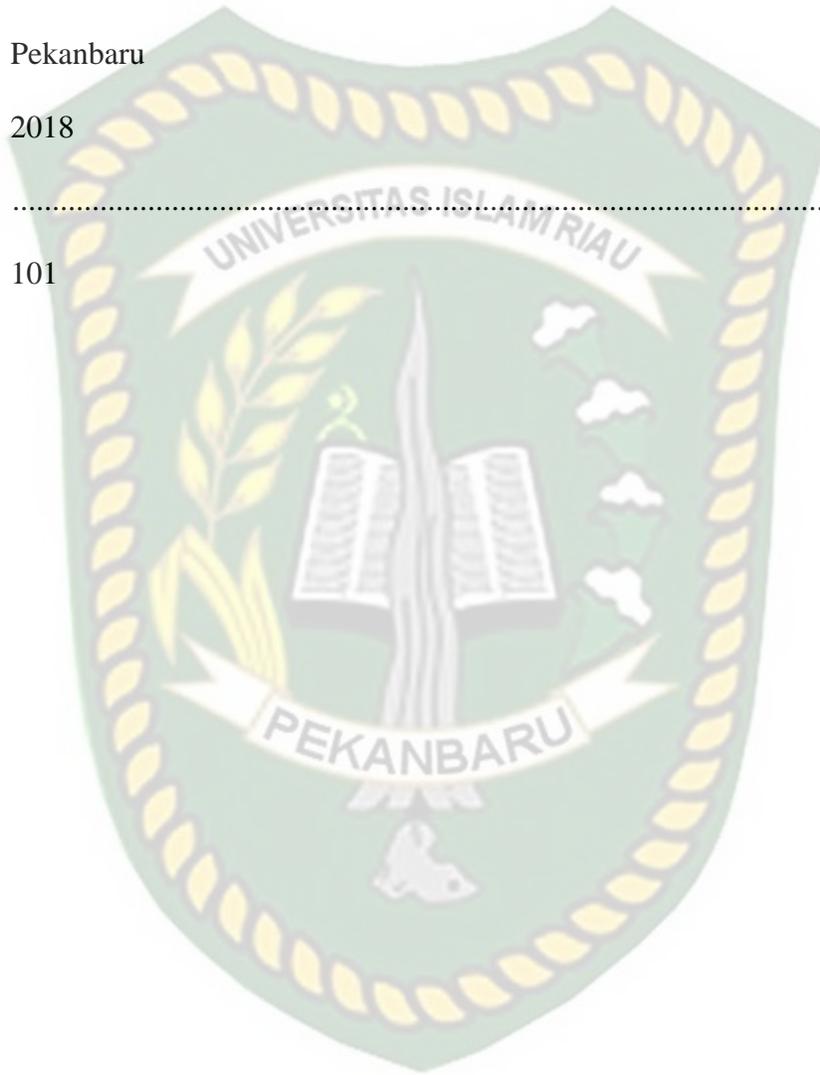
V.5	Identitas Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	80
V.6	Identitas Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	81
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Input (Masukan) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	83
V.8	Distribusi Tanggapan Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 Mengenai Indikator Input (Masukan) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	85
V.9	Distribusi Tanggapan Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Proses Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	88
V.10	Distribusi Tanggapan Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017 Mengenai Indikator Proses Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	89

V.11 Distribusi Tanggapan Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Output (Keluaran) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	92
V.12 Distribusi Tanggapan Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Mengenai Indikator Output (Keluaran) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	93
V.13 Distribusi Tanggapan Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Outcome (Dampak) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	96
V.14 Distribusi Tanggapan Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Mengenai Indikator Outcome (Dampak) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	97
V.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	100

V.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekanbaru Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun

2018

101



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Alur Proses Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	8
Gambar II.1 Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	41
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru	64

DAFTAR LAMPIRAN

Kuessioner Baadan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru	111
Kuessioner Partisipan Musrenang	118
Kuessioner Lurah Keamatan Tampan Kota Pekanbaru	124
Daftar Wawancara Musrenbang	131
Dokumentasi	137

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferhensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alvin Arighi
NPM : 157110691
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferhensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiatif) yang saya tulis sesuai dengan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Pekanbaru, 13 April 2020

Pelaku Pernyataan

Alvin Arighi

**EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU TAHUN 2018**

ABSTRAK

Alvin Arighi

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Perencanaan Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Yang mana pengukuran yang dilakukan penulis berdasarkan Indikator penilaian evaluasi yang dipergunakan yang meliputi input, proses, output dan outcome. Tipe penelitian yang berlokasi di Kecamatan Tampan adalah penelitian survey deskriptif yaitu penelitian yang menghimpun data yang meprioritaskan daftar kuessioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini terdapat dua populasi dan sampel yang terdiri dari 6 (enam) orang pegawai dan Masyarakat berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Keseluruhan responden tersebut dijadikan sampel dan pegawai dijadikan sebagai key formen dan teknik penarikan sampel ini menggunakan teknik sensus untuk pegawai dan purposive sampling untuk masyarakat. Yang mana teknik ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan dari suatu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan pada dasarnya telah berjalan sebagai mana yang telah direncanakan, akan tetapi masih adanya terdapat beberapa hal yang harus lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan indikator yang penulis gunakan. Saran yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan musrenbang adalah meningkatkan kenyamanan pelaksanaan kegiatan selama kegiatan berlangsung, dan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, dapat memberikan sosialisai atau mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan musywarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF MUSEAWARAH
DEVELOPMENT PLANNING (MUSRENBANG) IN TAMPAN
KECAMATAN PEKANBARU CITY IN 2018**

ABSTRACT

Alvin Arighi

KeyWords: Evaluation, Implamentation,and Development Plan

This study aims to determine the level of success of the Implementation of Development Planning Conference in Tampan District, Pekanbaru City. Which is the author's measurements based on evaluation evaluation indicators used which include input, process, output and outcome. This type of research is located in the District of Tampan is a descriptive survey research that is research that collects data that prioritizes the questionnaire list as a data collection tool. This study contained two populations and a sample consisting of 6 (six) employees and a total of 17 (seventeen) people. All respondents are sampled and employees are used as key formers and this sampling technique uses census techniques for employees and purposive sampling for the community. Which technique is used to measure the level of success of an implementation of the activities carried out. Evaluation of the Implementation of Development Planning Consultation (Musrenbang) in Tampan District basically has been going as planned, but there are still some things that need to be further improved in accordance with the indicators I use. Suggestions that need to be considered especially with regard to the implementation of musrenbang activities are to increase the comfort of the implementation of activities during the activity, and before the implementation of the activities carried out, can provide socialization or educate the public so that the public knows what is meant by development planning meetings (musrenbang).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki empat tujuan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satunya ialah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai kemakmuran yang dimaksud, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan disegala bidang yang berguna untuk mengejar segala bentuk ketertinggalan bangsa dari negara-negara maju. Untuk merencanakan pembangunan tersebut maka dibutuhkan suatu arahan atau kebijakan pembangunan nasional yang akan mengarahkan pembangunan tersebut untuk mencapai hasil pembangunan yang tepat guna dan berdaya guna sehingga tujuan negara mencapai masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud.

Kota pekanbaru yang merupakan ibu kota provinsi riau pada dasarnya memiliki 12 kecamatan, diantaranya kecamatan tampan. Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah \pm 199.792 KM².

Bidang administrasi pemerintahan daerah difokuskan pada pelaksanaan peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemberlakuan Undang-undang tersebut merupakan suatu tujuan untuk mencapai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan pemerintahan daerah mempunyai prinsip dasar yaitu otonomi daerah yang mana mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk proses dari demokrasi.

Menurut pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “ Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah”. Apabila suatu perencanaan sudah disusun dengan rapi dan

matang diyakini sistem penyelenggaraan pemerintahan akan berlangsung baik sesuai dengan harapan masyarakat serta visi dan misi pemerintah daerah. Musrenbang merupakan forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Musrenbang yaitu salah satu proses memajukan setiap daerah mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Pembangunan dilakukan oleh suatu organisasi dimana didalam konteks ini, organisasi tersebut merupakan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara merubah atau menciptakan perubahan-perubahan yang mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap masyarakat hingga peran sikap pemerintah.

Didalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkat kecamatan di dalam pelaksanaan kegiatannya ada beberapa partisipan Musrenbang kecamatan yang hadir untuk mewakili aspirasi masyarakat untuk mengusulkan suatu usulan perencanaan pembangunan, partisipan yang dimaksud adalah seluruh komponen masyarakat yang berada di kecamatan tersebut, seperti :

Partisipan dalam Musrenbang kecamatan yaitu:

1. Delegasi Kelurahan/Desa
2. Anggota DPRD dari dapil yang bersangkutan

3. LSM yang memiliki wilayah kerja di kecamatan bersangkutan
4. Kelompok-kelompok sektoral tingkat kecamatan seperti: petani, ojek, nelayan, buruh, serta kelompok lainnya
5. Kelompok perempuan
6. Perwakilan pengusaha lokal yang didasari pada kemampuan untuk meningkatkan sumber daya lokal

Adapun narasumber didalam Musrenbang Kecamatan antara lain :

1. Bappeda
2. Perwakilan SKPD
3. Camat dan aparat Kecamatan
4. Kepala-Kepala unit pelayanan di Kecamatan

Adapun mekanisme dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yaitu

- a. Pra Musrenbang Kecamatan

Pra musrenbang kecamatan dengan klasifikasi kegiatan sebagai berikut:

1. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
2. Rekrutmen Tim Pemandu Musrenbang oleh Bappeda
3. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Memilah dan mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing Kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.

- Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
- Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang Kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan agar peserta bias menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
- Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari Kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
- Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang Kecamatan.
- Informasi Pagu indikatif
- Membuat Draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan.

b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Memiliki agenda kegiatan sebagai berikut :

1. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
2. Pembukaan acara
3. Pemaparan Camat mengenai prioritas masalah Kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.

4. Pemaparan mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat Kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh Kepala-Kepala Cabang SKPD dari kota.
5. Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing Kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
6. Verifikasi oleh delegasi Kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
7. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
8. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh Kelurahan (kegiatan lintas Kelurahan yang belum diusulkan Kelurahan).
9. Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
10. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan berdasarakan masing-masing fungsi/SKPD.

11. Pemaparan prioritas pembangunan Kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.

12. Penetapan daftar nama delegasi Kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kota. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

13. Notulensi Musrenbang kecamatan sebagai bahan untuk memperbaiki draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan

c. Pasca Musrenbang Kecamatan

Tim Pelaksana Musrenbang kecamatan menyiapkan :

1. Dokumentasi hasil Musrenbang kecamatan
2. Penyusunan Berita Acara Musrenbang kecamatan.
3. Penyampaian hasil Musrenbang kecamatan kepada Kepala Bappeda.
4. Pengumuman hasil Musrenbang kecamatan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang kecamatan.
5. Pembekalan delegasi Musrenbang kecamatan
6. SK Camat untuk Tim Delegasi kecamatan

Musrenbang sendiri merupakan suatu bentuk forum musyawarah atau perundingan antar para pemangku kepentingan dalam suatu kecamatan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan

prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah kecamatan tersebut. Kegiatan Musrenbang kecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan dilaksanakan oleh camat. Adapun alur musrenbang Kecamatan Tampan sebagai berikut:

Gambar I.1 : Alur Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru



Sumber : Kantor Camat Tampan

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Musrenbang Kecamatan Tampan merupakan suatu wadah musyawarah, dimana

dalam Musrenbang kecamatan ini, usulan dari masing-masing masyarakat kelurahan yang ada dikecamatan Tampan akan dibahas dan akan ditentukan usulan-usulan apa saja yang akan diajukan dalam Musrenbang tingkat Kota Pekanbaru. Musrenbang kecamatan ini memiliki arti penting dalam pembangunan, karena Kecamatan Tampan ini merupakan salah satu wadah bagi masyarakat dan pemerintah dapat bertemu untuk membahas kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang belum ada maupun perbaikan fasilitas yang sudah ada, namun kaedahnya sudah tidak layak pakai lagi. Hal ini sebagai salah satu program pemerintah dalam merealisasikan pembangunan yang jenis perencanaannya bersifat *Bottom-Up*. Dalam melaksanakan musrenbang kecamatan Tampan ini, yang menjadi *Input* atau masukan adalah usulan-usulan masyarakat yang telah diproses melalui Rembuk RT dan Musrenbang masing masing kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan.

Seperti dalam Musrenbang Kecamatan Tampan yang menjadi usulan prioritas masyarakat adalah pada bagian lampiran, Tabel I.1 kita akan melihat usulan prioritas, untuk lebih jelasnya tercantum dalam table I.1 sebagai berikut :

Tabel I.1 Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Menurut Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru pada Tahun 2018

No.	Kegiatan Prioritas	Volume
1	2	3
1.	Semenisasi Jalan Lingkungan	12.500 M

2.	Normalisasi Sungai/ Leoning	2.200 M
3.	Parit Pembuangan	4.500 M
1	2	3
4.	Drainase	2.000 M
5.	Pembuatan Parit	6.000 M
6.	Aspal/ Hotmix	7.200 M
7.	Lampu Jalan	22 Titik
8.	Dam Kanal	1.050 M
9.	Turap	1.950 M
10.	Box Culvert	28 M
11.	Gorong – Gorong	80 M

Sumber: Kantor Camat Tampan, 2018

Berikut ini jenis usulan prioritas yang telah disepakati untuk dilakukan pembangunan pada Tahun 2018 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2 Daftar Urutan Kegiatan Prioritas di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018

No.	Kegiatan Pembangunan	Volume	Keterangan	Sumber Dana	
				Daerah	Pusat
1	2	3	4	5	6

1.	Semenisasi Jalan Lingkungan	11.510 M	3.720.000.000	2.976.000.000	744.000.000
1	2	3	4	5	6
2.	Drainase	1.800 M	1.160.000.000	846.800.000	313.200.000
3.	Lampu Jalan	12 Titik	156.000.000	156.000.000	-
4.	Jembatan	42 M	423.000.000	423.000.000	-
5.	Pengaspalan/ Hotmix	7.000 M	2.500.000.000	1.875.000.000	625.000.000
6.	Gorong-Gorong	60 M	67.000.000	67.000.000	-

Sumber: Kantor Bappeda Kota Pekanbaru, 2018

Tabel I.3 Daftar Urutan Kegiatan Prioritas yang Terealisasi di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2019

No.	Kegiatan Pembangunan	Volume	Keterangan	Sumber Dana	
				Daerah	Pusat
1.	Semenisasi Jalan Lingkungan	11.510 M	3.720.000.000	2.976.000.000	744.000.000
2.	Lampu Jalan	12 Titik	156.000.000	156.000.000	-
3.	Pengaspalan/ Hotmix	7.000 M	2.500.000.000	1.875.000.000	625.000.000
4.	Gorong-Gorong	60 M	67.000.000	67.000.000	-

Sumber: Kantor Bappeda Kota Pekanbaru, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dari sekian banyak program usulan yang telah diajukan dalam menunjang proses pembangunan suatu daerah khususnya yang berada di Kecamatan Tampan hanya beberapa program usulan yang diprioritaskan.

Kemudahan dari tabel juga dapat dilihat bahwa hanya sebagian kecil program usulan yang terealisasikan.

Hal ini tentu sangat tidak relevan, mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat itu sendiri yang seringkali hanya sebatas usulan tanpa adanya tindak lanjut dalam merealisasikan program usulan tersebut. Kebijakan dan pertimbangan yang matang dituntut dalam menentukan skala prioritas agar kebijakan yang diambil nantinya tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat tersebut dihadiri oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.4 Daftar Partisipan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018.

No.	Peserta Musyawarah	Hadir
1.	Lurah di Kecamatan Tampan	9
2.	Tokoh Masyarakat	9
3.	Kelompok Perempuan	8
Jumlah		26

Tabel I.5 Daftar Narasumber Musrenbang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018

No.	Narasumber	Hadir
1.	Camat Tampan	1
2.	Bappeda Kota Pekanbaru (Bidang Pengembangan Pemukiman dan Prarana Wilayah)	4
3.	Dinas PU Binamarga	1
Jumlah		6

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa masih kurangnya partisipasi dari para pelaku pembangunan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Tampan, terutama dari komponen masyarakat, hal ini menimbulkan adanya kecenderungan bahwa penetapan prioritas pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Tampan, hanyalah merupakan keputusan dari aparatur pemerintah tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang hadir hanya sekedar memenuhi undangan untuk hadir dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdapat beberapa fenomena. Fenomena tersebut diantaranya:

1. Dari kegiatan Musrenbang yang merupakan kegiatan dalam menampung aspirasi masyarakat dalam melakukan pembangunan, beberapa pembangunan yang telah di setujui untuk dilakukan pembangunan, diduga tidak terealisasikan pembangunannya.
2. Didalam Pelaksanaan kegiatan Musrenbang masih ada pihak yang seharusnya diundang, tapi ada beberapa partisipan yang tidak diundang dalam kegiatan musrenbang kecamatan ini seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dan berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang : **“Bagaimanakah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun Tujuan Peneliti dari Penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan kegiatan Musrenbang di kecamatan tampan tahun 2018.

2. Adapun Kegunaan Peneliti dalam Penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis,

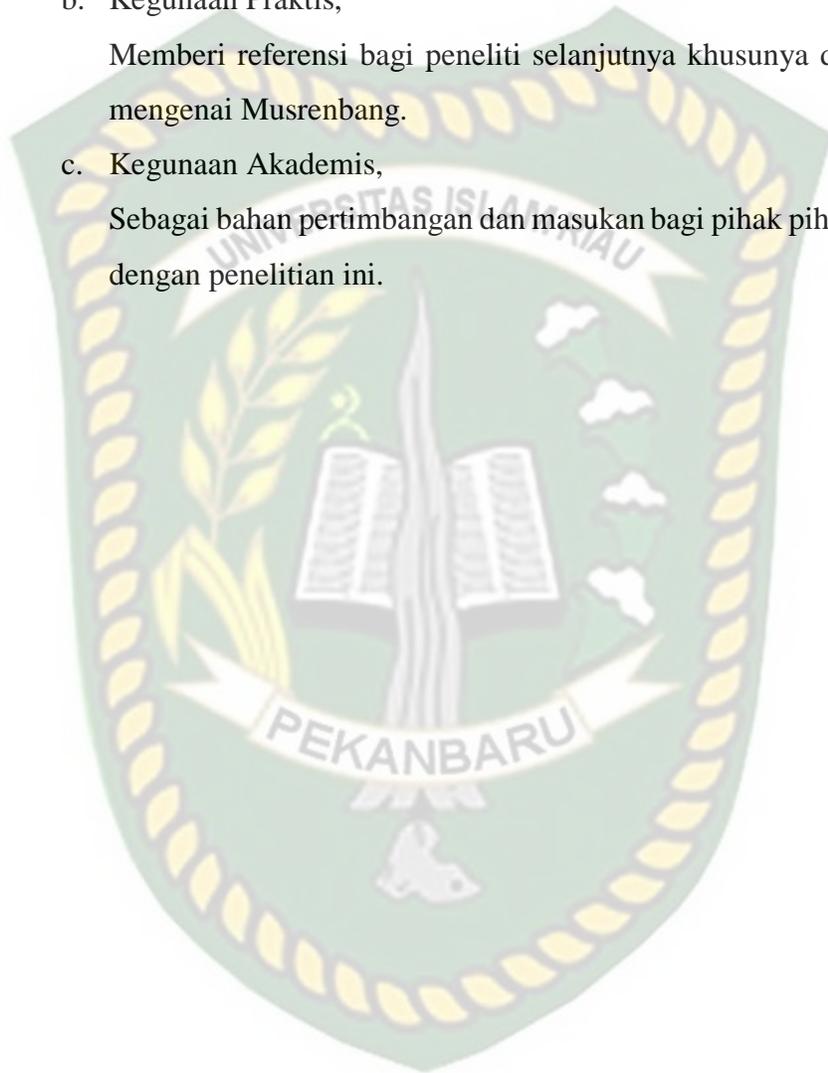
Sebagai sumbangan pikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini dan dapat dijadikan bahan informasi.

b. Kegunaan Praktis,

Memberi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam meneliti mengenai Musrenbang.

c. Kegunaan Akademis,

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam penelitian.

Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian serta diuraikan beberapa teori digunakan dalam penulisan ini.

1. Konsep Administrasi

Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial yang defenisismya tidak terbatas. Administrasi dalam arti luas yakni proses (rangkaiian) keegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Sebagai proses administrasi menggambarkan berjalannya sauatu kegiatan kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedang konsep adamnistrasi dalam arti sempit yakni sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Menurut Siagian (2007;5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada

umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan telah ditentukan sebelumnya.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005;17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan yang berlangsung di dalamnya.

Selanjutnya Zulkifli (2005;17) menyatakan bahwa administrasi bertitik tolak dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun luas (keseluruhan proses kerjasama), menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi, aspek-aspek yang dimaksud meliputi :

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepemimpinan
- d. Pengambilan keputusan
- e. Human relation
- f. Informasi
- g. Sumber daya

Dengan demikian administrasi adalah proses (rangkai) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *organon* dan istilah Latin *organum* yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Adapun pengertian atau definisi dari organisasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

Menurut Sarwoto (dalam Zulkifli, 2005:134) organisasi adalah sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Gitosudarmo (2000:1) organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Gomes (2003: 23) organisasi tidak lebih dari pada sekelompok orang yang berkumpul bersama disekitar suatu teknologi yang dipergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjadi barang atau jasa yang dapat dipasarkan.

Selanjutnya menurut Siagian (2007:6) organisasi adalah bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam ikatan yang

terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

3. Konsep Manajemen

Menurut Stoner et. al (dalam Zulkifli 2005;28) mengatakan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan dengan melalui orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara berurutan berjalan kearah satu tujuan.

Dalam menggerakkan organisasi seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Leslie. W Rue (2000;9) adalah seagai berikut:

- a. *Planning* (Perencanaan)
- b. *Organizing* (Organisasi)
- c. *Staffing* (Kepegawaian)
- d. *Motivating* (Motivasi)
- e. *Controlling* (Pengawasan)

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Pembuat keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Pengawasan
- f. Penyempurnaan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah dilaksanakan secara efektif.

Selanjutnya manajemen sangat dibutuhkan dalam kehidupan organisasi dengan 3 (tiga) alasan pokok sebagaimana dikemukakan Siagian (2007;12) berikut:

- a. Untuk mencapai tujuan organisasi
- b. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan maupun kreditur, pelanggan, konsumen, serikat kerja, asosiasi perdagangan masyarakat dan pemerintah.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Istilah manajemen yang berasal dari kata “*manage*” yang berarti memimpin, membimbing, dan mengatur. Secara tegas di definisikan oleh Terry

(dalam Winardi, 2004;4) yang menyatakan bahwa “Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain”.

Istilah manajemen berasal dari kata kerja “*manage*” yang berarti memimpin, membimbing dan mengatur. Secara tegas didefinisikan oleh Terry (dalam Winardi, 2000;4) yang menyatakan bahwa “manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber lain.

Dapat dipahami manajemen memiliki arti penting bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Diperlukan kecakapan dan keterampilan dari mereka yang dapat merencana, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi yang diharapkan secara efektif dan efisien, karena manajemen mencakup berbagai kegiatan yang dapat dioperasikan didalam organisasi.

4. Evaluasi

Evaluasi (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Menurut Siagian (2003:117) ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut menentukan status hidup organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan anatar hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Adapun indikator dari evaluasi pelaksanaan menurut Siagian (2003:117) yaitu:

1. Input (Masukan), adalah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan/implementasi program.
2. Proses, yaitu semua kegiatan sistem yang dilakukan melalui proses mengubah input menjadi output (keluaran) yang berbentuk produk dan/atau jasa.
3. Output (Keluaran), adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
4. Outcome (Dampak), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kata evaluasi berasal dari bahasa inggris yaitu evolution yang berarti penilaian atau penafsiran. Evaluasi dilakukan untuk mengukur/ mengetahui bagaimana hasil terhadap kinerja kebijakan yang telah dibuat. Evaluasi merupakan tahap akhir dari

perumusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan melakukan evaluasi, maka akan menumbuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, tentang ketidakseuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, berikut defenisi evaluasi menurut ahli:

Defenisi evaluasi yang dikemukakan oleh Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Proses Kebijakan Publik” yaitu:

Evaluasi dilakukan karena kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan untuk melihat sebab-sebab kegagalan. Suatu evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih sempit, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat suatu kebijakan” (Winarno, 2002:165).

Berdasarkan penegtrian diatas maka dapat diketahui bahwa dengan evaluasi maka akan dapat diketahui apakah suatu kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan telah berhasil atau gagal mencapai tujuan awal dibuatnya kebijakan tersebut dan berdampak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan evaluasi pula maka akan terlihat seberapa jauh manfaat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui dampak positif dan negatif atas dikeluarkannya suatu kebijakan, dan evaluasi dilakukan untuk menilai manfaat serta tujuan dibuatnya kebijakan tersebut oleh para pihak yang berkewajiban mengevaluasi kebijakan tersebut.

Sementara itu Suharsimi Arikunto memberikan defenisi mengenai pengertian evaluasi, yaitu:

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan (Suharsimi Arikunto, 2004:1)

Defenisi diatas menjelaskan bahwa evaluasi diperlukan untuk menghasilkan suatu informasi yang menyangkut terhadap efektivitas suatu kebijakan yang telah dibuat. Dengan informasi tersebut para pihak yang terlibat dalam proses evaluasi kebijakan tersebut dapat menentukan kebijakan yang akan diambil selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak.

Menurut Nurcholis (2007:277) Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” mendefenisikan bahwa:

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai.

Evaluasi secara sederhana menurut William N Dunn (dalam Agustino, 2014:187) berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan penilaian dan keberhasilan yang dapat memberikan informasi yang valid berkaitan dengan kinerja kebijakan.

Selanjutnya Evaluasi Program Menurut Hamalik (2003:212) adalah awal pengumpulan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian tindak lanjut yang tepat pula. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi para pengambil keputusan. Banyak ragam atau jenis evaluasi yang dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program. Hamalik (2003:212) mengemukakan bahwa model atau jenis evaluasi program tersebut adalah :

- a. Evaluasi Perencanaan dan Pengembangan, sasaran utamanya adalah memberikan bantuan kepada penyusunan program dengan cara menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka mendesain suatu program. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk meramalkan implementasi program dan kemungkinan tercapai tidaknya program dikemudian hari.
- b. Evaluasi Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah program mencapai sasaran efektif. Apakah hal-hal dan kegiatan yang telah didesain secara spesifik dalam program itu terlaksana sebagaimana mestinya. Kenyataan tidak jarang program justru tidak mencapai sasaran, karena apa yang telah didesain dalam program tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan

seperti pengadaan personil, fasilitas, perlengkapan, biaya, dan faktor-faktor penyebab lainnya.

- c. Evaluasi Dampak, bertujuan menilai seberapa jauh program dapat memberikan pengaruh tertentu pada sasaran yang telah ditetapkan, apakah program berdampak positif atau justru sebaliknya. Dampak tersebut diukur berdasarkan kriteria – kriteria keberhasilan, sehingga program tersebut perlu di spesifikasi agar dapat diamati dan diukur setelah program itu dilaksanakan.
- d. Evaluasi Efisiensi, dimaksud untuk menilai berapa besar tingkat efisiensi suatu program. Apakah program mampu memberikan keuntungan memadai ditinjau dari segi biaya yang dikeluarkan, tenaga yang digunakan dan waktu yang terpakai.
- e. Evaluasi Program Komprehensif, yaitu dampak menyeluruh terhadap program yang meliputi : implmentasi program, dampak atau pengaruh setelah program dilaksanakan dan tingkat efisiensi program.

5. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin Usman, 2002:70), mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut The Liang Gie (dalam Poerwaarminta,2003:553) Pelaksanaan Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.

Menurut Nurdin Usman dalam buku yang berjudul “Konteks Berbasis Iplementasi Kurikulum” menyatakan pedapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

Implementasi diarahkan untuk kegiatan, tindakan-tindakan atau mekanisme sistem implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan (Usman, 2002:70).

Menurut Siagian (2006:126), Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ada pembinaan dari atasan kepada bawahan.

Menurut Abdullah (dalam Nurdin Usman, 2003,70) Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan. Adapun indikator keberhasilan program menurut Abdullah (dalam Nurdin Usman,2003,70) sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Menurut Guntur Setiawan (2004:39) Implementasi atau pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif.

Menurut Hanifa Harsono (2002:67), Implementasi atau pelaksanaan adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut kedalam tindakan kebijakan

politik dalam pembangunan kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2004:32), pelaksanaan merupakan tahapan dalam policy cycle (lingkaran kebijakan) dan keseluruhan proses kebijakan yang berlangsung dalam suatu policy system (sistem kebijakan) yang kompleks dan dinamik, serta akan menentukan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan.

Menurut Syaukani (2004:295), implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Mereka termasuk serangkaian kegiatan, persiapan pertama maju menetapkan aturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan dari kebijakan tersebut. Kedua, mempersiapkan sumber daya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan termasuk infrastruktur, sumber daya keuangan dan tentu saja penentuan siapa saja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan konkret untuk umum.

Sementara itu menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (2005:65) menjelaskan arti dari pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang

meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi/ dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsesus bersama mengenai priritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pemabngunan Nasional (SPPN), di dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bawah Musrenbang adalah forum antar pelaku dan menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholder ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang Kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan dikecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang

berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Lembaga penyelenggaraan Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

7. Administrasi Pembangunan

Dalam hal pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, serta tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan. Menurut Siagian (2001; 4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Selanjutnya menurut Hamim (2003;56) pembangunan adalah suatu kegiatan atau usaha secara sadar terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi yang lebih baik.

Siagian (2001;4) mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas yang mencakup :

- a. Pembangunan di bidang politik
- b. Pembangunan di bidang ekonomi
- c. Pembangunan di bidang sosial budaya
- d. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan

8. Teori Partisipasi

a. Pengrtian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari bahasa inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan. Partisipasi berarti peran serat seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk kegiatan dengan member masukan pikiran, tanaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010;46).

Pengertian partisipasi juga dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001;201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, barang dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwakelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, mebuat keputusa, serta memecahkan masalah.

H.A.R. Tilar, (20009;287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses

desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*Bottom up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001;38) mengkategorikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

1) Partisipasi Langsung

Partisipasi langsung merupakan suatu partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2) Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi tidak langsung adalah partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

b. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip dalam (Siti Irene Astuti, 2011;58), terbagi dua yaitu:

1) Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam

hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

2) Partispasi Horizontal

Partispasi horizontal adalah dimana masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal atau dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi (dalam Siti Irene Astuti, 2011;58) partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Partispasi Fisik

Partispasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.

2) Partispasi Non Fisik

Partispasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

9. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan dapat dikaitkan dengan konteks pembangunan dimana dalam pembangunan terdapat suatu perencanaan agar sasaran pembangunan

tercapai sehingga dikenal istilah perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah kegiatan dari pembangunan yang paling prioritas, karena perencanaan dalam pembangunan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan.

Dalam arti luas perencanaan merupakan upaya manusia dalam meminimalkan ketidakpastian, dan perencanaan itu dapat dikatakan perencanaan yang ideal jika langkah langkah yang dilakukan manusia itu sendiri semakin dekat dengan kehidupan manusia, sedangkan dalam arti sempit, perencanaan berarti derivat dari kemampuan *forsight* itu, yaitu kemampuan “mengukur” (measuring) Nugroho dan Wrihatnolo (2011;2).

Menurut Tjokroamidjojo (dalam elisa.ugm.ac.id (2014;1) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Menurut M.L Jhingan (dalam Nugroho dan Wrihatnolo, 2011;3) pada umumnya tugas perencanaan adalah “mengukur”, namun yang menjadi permasalahan adalah dimana tidak semua materi yang digunakan dalam pembangunan tersebut dapat diukur dengan mudah. Dan yang menjadi tugas perencanaan adalah mendefinisikan segala materi yang sulit untuk dihitung dan didefinisikan menjadi sesuatu yang dapat didefinisikan dan dapat dinyatakan dalam proses perencanaan.

Adapun bentuk bentuk perencanaan menurut Tri widodo (dalam Nugroho dan Wrihatnolo, 2014;4) yaitu :

- a. Perencanaan menurut jangka waktu
- b. Perencanaan menurut sifat dorongannya
- c. Perencanaan menurut alokasi sumber daya
- d. Perencanaan menurut tingkat keluwesan
- e. Perencanaan menurut sistem ekonomi
- f. Perencanaan menurut arus informasi
- g. Perencanaan menurut dimensi pendekatan, dan
- h. Perencanaan menurut aktivitas lingkaran pembangunan

Menurut B.S Muljana (2001;4) Perencanaan pembangunan menurut jangka waktu di bagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Perencanaan Jangka Panjang (Prespektif), biasanya memiliki rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Perencanaan prespektif dikarenakan jangkauannya yang melintasi beberapa tahun dimana pada umumnya perencanaan ini tentang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- b. Perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka menengah ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu atau rentang waktu antara empat sampai lima tahun.

- c. Perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka pendek mempunyai rentang waktu satu tahun. Rencana ini sering disebut sebagai rencana operasional tahunan. Perencanaan-perencanaan jangka pendek yang diterapkan di Indonesia antara lain Rencana Pembangunan Tahunan (Rapeta atau Rapetada).

Pandangan diatas merupakan urat nadi untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pada suatu negara. Perencanaan yang matang, terukur, dan terarah akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan kemudahan terhadap evaluasi dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, ada 4 (empat) tahapan dalam perencanaan pembangunan yaitu:

- 1) Tahap Penyusunan Rencana

Tahap ini dilaksanakan untuk dapat menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang sudah siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah :

- a. Penyiapan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik menyeluruh dan terukur.
- b. Masing-masing instansi menyiapkan rancangan kerja dengan berpedoman pada rencana pembangunan yang telah disiapkan.

- c. Melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
- d. Penyusunan akhir rencana pemabngunan.

2) Tahap Penetapan Rencana

Tahap ini berfungsi sebagai penetapan rencana pembangunan tersebut menjadi suatu produk hukum yang mengikat semua pihak yang melaksanakan.

3) Tahap Pengendalian Pelaksana rencana

Tahap ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang pada rencana kegiatan-kegiatan, kserta koreksi dan penyesuain selam pelaksanaan rencana tersebut oleh pemimpin/kementrian/lembaga/satuan perangkat daerah.

4) Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan adalah bagian dari perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian tujuan sasaran dan kerja pembangunan.

Berkaitan dengan tahapan perencanaan pembangunan, maka perlu ditentukan suat pembatasan ataupun prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periodenya atau jangka waktu perencanaannya. Oleh karena itu perlu untuk disusun suatu perencanaan berdasarkan target waktu atau jangka waktu perencanaan.

Berdasarkan klasifikasi menurut waktu, maka proses perencanaan pembangunan nasional dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

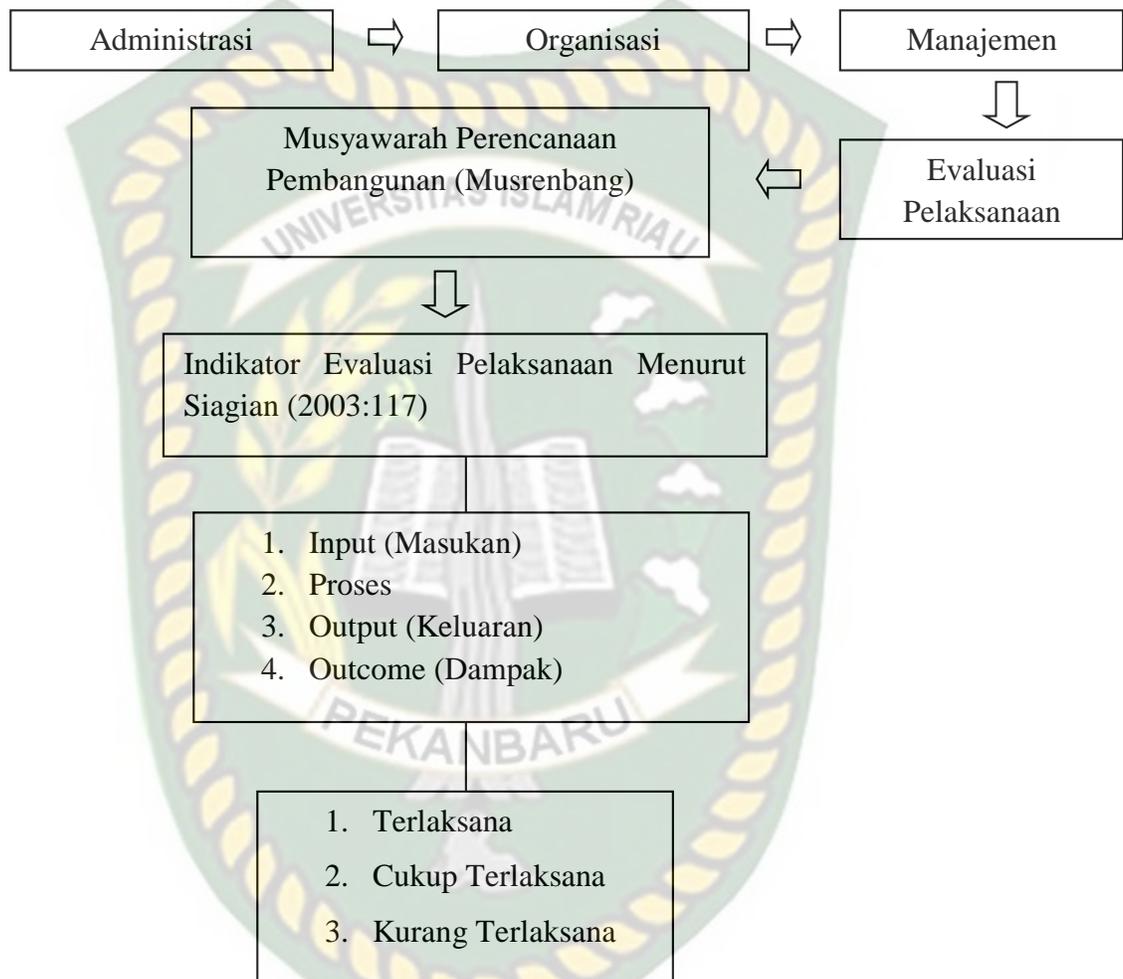
- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya di singkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah Kementerian/lembaga, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/Lemabaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
 - b. Reencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Tahunan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
 - a. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja kementerian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
- d. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel penelitian ini tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018. Adapun kerangka alur pikir peneliti dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**



Sumber: Olahan Penulis, 2019

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variable tersebut).

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan juga sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
4. Evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

5. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang oleh Kecamatan Tampan.
6. Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat.
7. Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota.
8. Kota adalah pusat permukiman penduduk dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administrasi.
9. Input (Masukan), adalah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan/implementasi program.
10. Proses, yaitu semua kegiatan sistem yang dilakukan melalui proses mengubah input menjadi output (keluaran) yang berbentuk produk atau jasa.
11. Output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran atau tujuan program kebijakan.
12. Outcome (Dampak) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018. Adapun penjabaran variabel dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II.1 : Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyata yang dicapai dengan hasil-hasil seharusnya dicapai (Siagian 2003:117)	Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018	1.Input (Masukan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya narasumber terkait pelaksanaan musrenbang b. Mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan musrenbang c. Pemenuhan fasilitas dalam pelaksanaan musrenbang 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2.Proses	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kegiatan musrenbang berdasarkan regulasi yang ada b. Menghargai semua pendapat partisipan musrenbang c. Diskusi timbal balik dalam penetapan usulan prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		3.Output (Keluaran)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan usulan prioritas berdasarkan yang 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksana

			<p>dibutuhkan masyarakat</p> <p>b. Kepuasan terhadap usulan rencana program pembangunan</p> <p>c. Kepuasan masyarakat terhadap penetapan usulan prioritas</p> <p>4.Outcome (Dampak)</p> <p>a. Tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan musrenbang</p> <p>b. Pengaruh program kegiatan terhadap masyarakat</p> <p>c. Kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan musrenbang</p>	<p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p> <p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>
--	--	--	---	---

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variable dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator

Ukuran Variabel

Terlaksana:

Apabila penilaian terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, 67-100%

Cukup Terlaksana :

Apabila penilaian terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018. 34-66%

Kurang Terlaksana:

Apabila penilaian terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018. 1-33%

Ukuran Indikator Variabel

1. Input (Masukan)

Terlaksana:

Apabila penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, berada pada skala 67-100%.

Cukup Terlaksana :

Apabila penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, berada pada skala 34-66%.

Kurang Terlaksana:

Apabila penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, berada pada skala 1-33%.

2. Proses

Terlaksana :

Apabila penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, berada pada skala 67-100%.

Cukup Terlaksana :

Apabila penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, berada pada skala 34-66%.

Kurang Terlaksana :

Apabila penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, berada pada skala 1-33%.

3. Output (Keluaran)

Terlaksana : Apabila penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, berada pada skala 67-100%.

Cukup Terlaksana:

Apabila penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, berada pada skala 34-66%.

Kurang Terlaksana:

Apabila penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, berada pada skala 1-33%.

4. Outcome (Dampak)

Terlaksana:

Apabila penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, berada pada skala 67-100%.

Cukup Terlaksana:

Apabila penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, berada pada skala 34-66%.

Kurang Terlaksana :

Apabila penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2018, berada pada skala 1-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan secara cermat dan menyeluruh terhadap suatu konsep atau fenomena-fenomena sosial tertentu. Kemudian penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Menurut Arikunto (2006;12) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Selain data yang berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif.

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian survey. Menurut Iskandar (2008;66) penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala, ciri khas penelitian ini adalah data penelitian dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner.

B. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009;41), penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan alasan bahwa masih ditemukannya permasalahan terkait pelaksanaan Musrenbang pada Kecamatan Tampan.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2006;130) populasi adalah keseluruhan objek penelitian Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan elemen-elemen yang menjadi objek penelitian. Adapun dalam populasi ini antara lain Camat Tampan, Perwakilan Lurah di Kecamatan Tampan, Perwakilan Bappeda Kota Pekanbaru, Perwakilan Dinas PU (Pekerjaan Umum) Binamarga, RT/RW dan beberapa tokoh masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 Daftar Responden Penelitian

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Camat Tampan	1	1	100%
2.	Perwakilan Bappeda Kota Pekanbaru (Bidang Pengembangan Pemukiman dan Prasarana Wilayah)	4	4	100%
3.	Perwakilan Dinas PU Binamarga	1	1	100%
4.	Perwakilan Lurah yang menjabat pada tahun 2018	9	4	44%
1	2	3	4	5
5.	Kelompok Perempuan	8	8	100%
6.	Tokoh Masyarakat	9	5	55%
Jumlah		32	23	

D. Teknik Penarikan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability, yaitu dengan purposive sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan. Pengambilan sampel dengan metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang resfentatif sesuai dengan kriteria yang di tentukan. Kriteria tersebut adalah responden yang banyak mengetahui tentang kegiatan Musrenbang ini.

Menurut Iskandar (2005;69) sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara respresentatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan teknik sensus, untuk Camat Tampan dan Perwakilan Lurah sedangkan untuk Ketua RT, Ketua RW dan Tokoh Masyarakat dilakukan secara purposif sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data Primer : Menurut Iskandar (2008;252) data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan respinden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Prioritas kebutuhan masyarakat, komunikasi dan interaksi diantara stakeholder dan legalitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- 2) Data Skunder menurut iskandar (2008;253) data skunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaa, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya memiliki relefansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data gambaran umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, data perencanaan pembangunan, data keuangan atau anggaran kegiatan pembangunan serta data data yang lain menurut penulis yang dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Wawancara, menurut Ridwan (2009;29) wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab dengan Camat, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu daftar pertanyaan telah disiapkan sebelumnya.
- 2) Kuisisioner, menurut Usman (2009;57) kuisisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan disebarkan kepada perangkat Camat, dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan.
- 3) Observasi, menurut Usman (2009;52) teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-dat awal dan data sekunder dari Kantor Camat Kecamatan Tampan dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.
- 4) Studi Dokumentasi, Menurut Ridwan (2009;31) studi dokumentasi adalah ditujuka untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi

buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, ;aporan kegiatan dan data yang relevan dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Menurut Arikunto (2006;235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner diuraikan dalam bentuk table yang merupakan data data kuantitatif, sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi diuraikan dalam bentuk uraian kalimat yang merupakan data kualitatif dan dianalisis secara deskriptif, yaitu menggambar dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan antara kondisi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Kecamatan Tampan yang seharusnya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

H. Jadwal Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																			
		Juli- Oktober				November- Desember				Januari- Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																				
2.	Seminar UP																				
3.	Revisi UP																				
4.	Revisi Kuissioner																				
5.	Rekomendasi Survey																				
6.	Survey Lapangan																				
7.	Analisis Data																				
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
9.	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10.	Ujian Komperhensif																				
11.	Revisi Skripsi																				
12.	Pengadaan Skripsi																				

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru Terletak pada titik koordinat 101° 14 – 101° 34 bujur timur dan 0° 25' – 0°45' Lintas Utara. Secara georafi, Kota Pekanbaru merupakan tergolong daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari aluvial dengan pasir dan pinggiran kota pada umumnya terdiri dari tanah organosol dan humus yang merupakan rawa – rawa yang bersifat asam, sangat krosif untuk besi.

Ibu Kota Provinsi Riau Terletak di Kota Pekanbaru dan jarak Kota Pekanbaru dari beberapa Kota disekitar Kota Pekanbaru antara lain:

1. Pekanbaru – Taluk Kuantan = 118 km
2. Pekanbaru – Rengat = 159 km
3. Pekanbaru – Plk. Kerinci = 33,5 km
4. Pekanbaru – Siak = 74,5 km
5. Pekanbaru – Bangkinang = 51 km
6. Pekanbaru – Ps. Pengaraian = 128 km
7. Pekanbaru – Bagan = 192 km
8. Pekanbaru – Dumai = 125 km
9. Pekanbaru – Selat Panjang = 141 km

Dari keterangan diatas menunjukkan jarak antara Kota Pekanbaru dengan Kota – kota lainnya yang ada di Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru terdiri atas 12 Kota Kecamatan, berikut adalah daftar Kecamatan dan luas Wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru:

Tabel IV.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tampan	59,81	138.304	130.758	269.062

2	Payung Sekaki	43,24	46.360	44.305	90.665
3	Bukit Raya	22,05	53.448	49.666	103.114
4	Marpoyan Damai	29,74	68.050	63.195	131.245
5	Tenayan Raya	171,27	81.777	76.742	158.519
6	Lima Puluh	4,04	20.627	20.810	41.437
7	Sail	3,26	10.728	10.751	21.437
8	Pekanbaru Kota	2,26	12.716	12.378	25.094
9	Sukajadi	3,76	23.531	23.833	47.364
10	Senapelan	6,65	18.141	18.407	36.548
11	Rumbai	128,85	35.349	32.174	67.523
12	Rumbai Pesisir	157,33	37.360	35.147	72.516
Jumlah		632,26	546.400	518.166	10.064.566

Sumber: Pekanbaru dalam Angka, Tahun 2019

Dari tabel diatas, terlihat bahwa kecamatan Tampan yang mendominasi jumlah penduduk terbesar yaitu 269.062 sedangkan jumlah penduduk terendah adalah kecamatan Sail yaitu 21,479 letak Kota Pekanbaru yang sangat strategis dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang yang memperoleh manfaat dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang hasil penyelundupan, kemudian jika dilihat letak Kota Pekanbaru yang secara geografis terletak diantara:

1. Di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
2. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
3. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Siak.
4. Sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.

Provinsi Riau dengan Pekanbaru sebagai ibukotanya yang provinsinya dikelilingi oleh laut dan berbatas dengan Negara tetangga, sehingga dalam hal ini memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh organisasi perdagangan gelap internasional. Karena kondisi tersebut memudahkan untuk berhasilnya penyelundupan dan perdagangan gelap mobil-mobil mewah ke daerah Riau.

Secara administrasi kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung terhadap kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat 1 Riau. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahannya dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Kondisi Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,4°C-33,8°C dan suhu udara minimum 23,0°C-24,2°C sebagaimana daerah lainnya yang beriklim tropis, di Kota Pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim panas dan musim hujan.

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Dibawah ini akan dipaparkan banyak penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2016 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel IV.2 : Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	55.782	50.967	106.749
2	5-9	47.106	42.907	90.013

3	10-14	43.553	40.616	84.169
4	15-19	48.825	50.516	99.341
5	20-24	61.867	60.589	122.456
6	25-29	49.632	47.202	96.834
7	30-34	44.537	43.748	88.385
8	35-39	42.821	40.166	82.987
9	40-44	36.684	33.584	70.268
10	45-49	30.073	26.199	56.272
11	50-54	15.714	14.430	30.144
12	55-59	15.714	14.430	30.144
13	60-64	9.311	8.106	17.417
14	65-69	5.691	5.711	11.402
15	70-74	3.398	3.772	7.170
16	75>	2.467	3.888	6.355

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

2. Gambaran Umum Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 KM². Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar

2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP No.19 Tahun 1987 yang diatas tadi. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
Sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah $\pm 59,81$ KM² yang terdiri dari 9 kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Air Putih
- b. Kelurahan Binawidya
- c. Kelurahan Delima
- d. Kelurahan Simpang Baru
- e. Kelurahan Sialang Munggu
- f. Kelurahan Sidomulyo Barat
- g. Kelurahan Tuah Madani
- h. Kelurahan Tobek Gadang
- i. Kelurahan Tuah Karya

3. Gambaran Singkat Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan) Kota Pekanbaru

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut BAPPEDA Kota Pekanbaru merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Pekanbaru di bidang perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Dasar hukum terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden (Keppres) No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di latar belakang beberapa pertimbangan yaitu dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, menjadi perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Selanjutnya atas dasar Keppres No. 27 Tahun 1980 menetapkan Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Pekanbaru nomor 5 tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Pekanbaru. Peraturan ini bermaksud untuk

memperbaharui peraturan sebelumnya sekaligus menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja yang pernah dibentuk.

3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Tekhnis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Peraturan ini menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

Visi dan Misi BAPPEDA Kota Pekanbaru

Sebagai suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan dan pembangunan tentunya mempunyai visi dan misi yang telah diterapkan sejak awal berdirinya organisasi pemerintahan negara tersebut, yang mana visi dan misi BAPPEDA Kota Pekanbaru adalah:

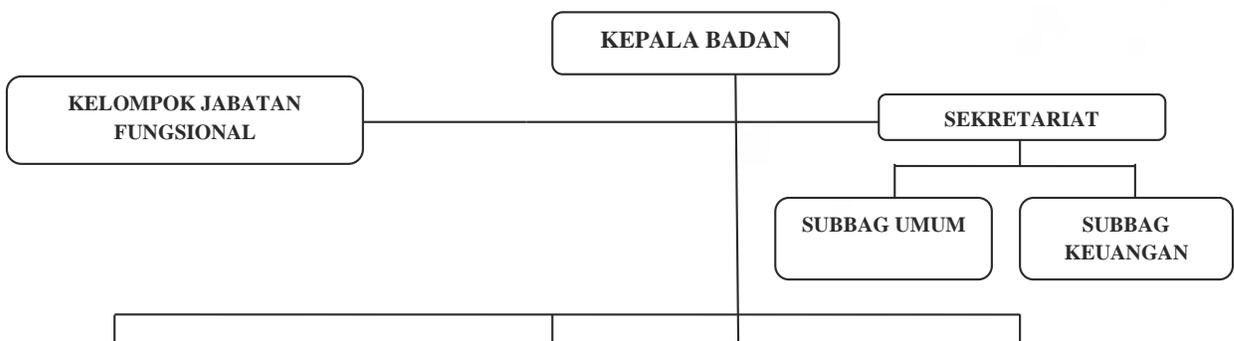
Mengacu pada visi Kota Pekanbaru, dengan dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai unit perencana di daerah, maka dirumuskan visi BAPPEDA Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Bappeda Kota Pekanbaru

yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya dituangkan dalam Renstra-OPD. Adapun visi BAPPEDA Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 adalah “Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis menuju Pekanbaru smartcity yang madani”. Dari tugas dan fungsi serta visi, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru adalah:

1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi kinerja rencana pembangunan daerah sebagai data pendukung untuk proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan.
3. Meningkatkan kompetensi ASN perencana serta kapasitas kelembagaan.

B. Struktur Keorganisasian Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Pekanbaru

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Pekanbaru





Sumber : Bappeda Kota Pekanbaru 2019

Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pembangunan dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris jenderal.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

- a. Kepala Badan

- b. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengembangan Pemukiman dan Wilayah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pra Sarana Wilayah
 - b. Sub Bidang Permukiman dan Penataan Kawasan
 - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup
- d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Sumber Daya
 - c. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja
- e. Bidang Perekonomian dan Pemerintahan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perekonomian dan Investasi
 - b. Sub Bidang Perdagangan dan Jasa
 - c. Sub Bidang Pemerintahan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

C. Fungsi dan Tugas Organisasi

Dari penyusunan bidang-bidang pekerjaan yang berdasarkan atas struktur organisasi tersebut maka dapat kita lihat uraian tugas dari tiap-tiap bidang maupun tiap-tiap seksi pekerjaan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota pekanbaru, yaitu terdiri dari:

1. Kepala Badan

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pimpinan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah
- d. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- e. Pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- f. Pengoordinasian dan pengawasan semua urusan bidang perencanaan serta menyelenggarakan urusan ketatausahaan badan
- g. Penyelenggaraan urusan penatusahan badan sesuai dengan kewenangannya.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang, penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program badan.
- b. Pengoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan dilingkungan badan penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan,

pengoordinasian, pembinaan dan perumusan program kerja tahunan di lingkungan badan, pengoordinasian dan pengarah kegiatan sub bagian-sub bagian.

- c. Pengoordinasian, pengarah, Pembina dan perumus pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan umum dan rumah tangga di lingkungan badan.
- d. Pengoordinasian dan pelaksana pelayanan dan pengaturan rapat dinas, serta upacara keprotokolan, pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban badan.
- e. Pengoordinasian, Pembina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

- a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyusunan program kerja dan membuat laporan tahunan, perumusan dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-

undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum/tata usaha, dan perlengkapan.

- c. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang umum, kepegawaian dan program, perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (binap) serta peningkatan kualitas pegawai.
- d. Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor, pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat, pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, Tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan.
- e. Perumusan dan pelaksanaan urusan rumah tangga badan, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas, perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi unit kerja lingkungan badan, penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan badan.
- f. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji

berkala, buku induk pegawai, menyusun dokumen dan registrasi ASN di lingkungan badan.

- g. Pengelolaan data pegawai serta pengarsipan sasaran kinerja pegawai. Perumusan dan penyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.
- i. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan, perumusan, pelaksanaan dan penghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, laporan fisik program pembangunan, laporan tahunan, laporan evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- k. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan badan.

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Perumusan dan pengoordinasian pembinaan bidang keuangan badan. Perencanaan program kerja sub bagian keuangan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan badan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran, penyiapan surat perintah membayar, pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan, pelaksanaan verifikasi laporan pertanggung jawaban, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, pelaksanaan akuntansi badan.
- c. Penyiapan laporan keuangan badan. Perencanaan program kerja pengelolaan dan erjalan dinas badan. Perencanaan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga badan. Penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis. Penyusunan tindak lanjut temuan periksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- d. Pengevaluasian tugas pembinaan biang keuangan dan asset badan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bada penyempurnaan lebih lanjut. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasaran Wilayah

- a. Pengoordinasian dan pembinaan penghimpunan peraturan perundang-undangan , kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan bahan lain yang berhubungan dengan biang pengembangan pemukiman dan prasarana wilayah sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Pengoordinasian dan pembinaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang pengembangan permukiman dan prasarana wilayah.
- c. Pengoordinasian dan pembinaan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas.

- d. Pengoordinasian dan pembinaan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan program kerja bidang pengembangan permukiman dan prasarana wilayah.
- e. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pemabngunan Tahunan, Ranperda APBD) bidang pengembangan permukiman dan prasarana wilayah.
- f. Pengoordinasian pelaporan dari SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pengembangan permukiman dan prasara wilayah.
- g. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perenanaan bidang pengembangan dan pemuliman dan prasarana wilayah.
- h. Penyiapan bahan bahan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKAKIP) serta laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan kepala daerah bidang pengembangan permukiman dan prasarana wilayah.
- i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pengembangan permukiman dan prasarana wilayah.
- j. Pengoordinasian penyiapan dalam rangka kerjasama pembangunan antar daerah, dan kerja sama dengan swasta dalam negeri dan luar negeri bidang pengembangan permukiman dan prasarana wilayah.

- k. Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah bidang pengembangan permukiman dan prasarana wilayah.

Terdapat tiga sub bidang di bidang pengembangan pemukiman dan prasarana wilayah, yaitu:

- a. Sub Bidang Prasarana Wilayah
- b. Sub Bidang Permukiman dan penataan kawasan
- c. Sub Bidang Lingkungan Hidup

6. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya

- a. Pengoordinasian dan pembinaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya.
- b. Pengoordinasian dan pembinaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta menyiapkan bahan pemecah masalah yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya.
- c. Pengoordinasian dengan pembinaan kerjasama dengan unit kerja/instansu terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Pengoordinasian dan pembinaan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan program kerja bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya.

- e. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah (RPJP, RPJM Rencana Pembangunan Tahunan, Ranperda APBD) bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya.
- f. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya.
- g. Pengoordinasian pelaporan dari SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya.
- h. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta laporan pertanggung jawaban tahunan dan akhir masa jabatan kepala daerah bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya.
- i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya.
- j. Pengoordinasian penyiapan bahan-bahan dalam rangka kerjasama pembangunan antar daerah, dan kerja sama dengan swasta dalam negeri dan luar negeri bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya.
- k. Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya.

Terdapat tiga sub bagian di bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya, yaitu :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Sumber Daya
- c. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

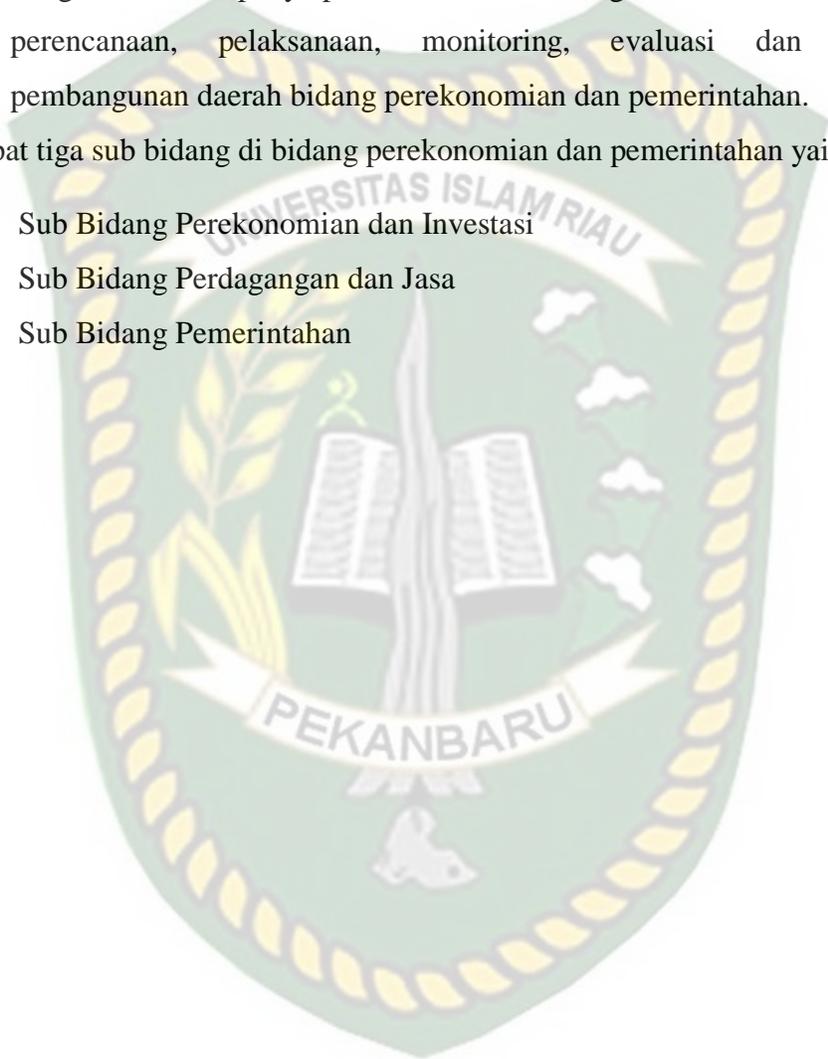
7. Bidang Perekonomian dan Pemerintahan

- a. Pengoordinasian dan pembinaan penghimpunan peraturan perundang undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perekonomian dan pemerintahan.
- b. Pengoordinasian dan pembinaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta menyiapkan bahan pemecah masalah yang berhubungan dengan bidang perekonomian dan pemerintahan.
- c. Pengoordinasian dan pembinaan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Pengoordinasian dan pembinaan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan program kerja bidang perekonomian dan pemerintahan.
- e. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan rencana pembangunan (RPJP, RPJM, Rencana Pembangunan Tahunan, Ranperda APBD) bidang perekonomian dan pemerintahan.
- f. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian dan pemerintahan.
- g. Pengoordinasian pelaporan dari SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang perekonomian dan pemerintahan.
- h. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta laporan keterangan pertanggung jawaban tahunan dan akhir masa jabatan kepala daerah bidang perekonomian dan pemerintahan.
- i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang perekonomian dan pemerintahan.

- j. Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka kerjasama pembangunan antar daerah dan kerja sama dengan swasta dalam negeri dan luar negeri bidang perekonomian dan pemerintahan.
- k. Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah bidang perekonomian dan pemerintahan.

Terdapat tiga sub bidang di bidang perekonomian dan pemerintahan yaitu:

- a. Sub Bidang Perekonomian dan Investasi
- b. Sub Bidang Perdagangan dan Jasa
- c. Sub Bidang Pemerintahan



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017, peneliti mengambil data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan di paparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 23 orang responden yang terdiri dari 1 Camat Tampan Kota Pekanbaru, 4 orang Staff bidang Pengembangan Pemukiman dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pekanbaru, 1 orang Perwakilan Dinas PU Binamarga, 4 orang Perwakilan Lurah yang menjabat pada tahun 2017, 8 orang Kelompok Perempuan, dan 5 orang Tokoh Masyarakat . Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut:

1. Umur

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Selanjutnya dapat dilihat identitas responden tentang umurnya pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 Distribusi Jumlah Responden Narasumber (Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda), Camat dan Dinas PU Bina Marga Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur.

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1.	20-30 tahun		
2.	31-40 tahun	3	50%
3.	41-50 tahun	3	50%
4.	>50 tahun		
Jumlah		6	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel V.1 diatas diketahui bahwa identitas responden pada Bappeda Kota Pekanbaru berdasarkan tingkat usia peneliti dapat menggambar bahwa umur responden berjumlah sama rata yaitu berada pada umur 31-40 tahun berjumlah 3 orang, dan umur 41-50 tahun berjumlah 3 orang.

Tabel V.2 Distribusi Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan umur

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	20-30 tahun	1	5%
2	31-40 tahun	4	24%
3	41-50 tahun	12	71%
4	>50 tahun	-	-
Jumlah		17	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari Musrenbang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017 berdasarkan tingkat usia, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa yang mendominasi tingkat umur

responden berada pada tingkatan umur responden 41-50 tahun berjumlah 12 orang atau 71%. lalu umur responden pada 31-40 tahun berjumlah 4 orang atau 24% dan responden yang memiliki umur 20-30 tahun berjumlah 1 orang atau 5%. Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada umur 41-50 tahun.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan terkait pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan, antara lain :

Tabel V.3 Identitas Distribusi Jumlah Responden Narasumber (Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda), Camat dan Dinas PU Bina Marga Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	5	83%
2	Perempuan	1	17%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel V.3 dapat dilihat jumlah responden laki laki sebanyak 5 orang atau 83% dan jumlah responden perempuan berjumlah 1 orang atau 17 %. Hal ini menunjukkan mayoritas responden dari Narasumber Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Camat dan Dinas PU mayoritasnya berjenis kelamin laki-laki.

Tabel V.4 Identitas Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	9	53%
2	Perempuan	8	47%
	Jumlah	17	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel V.4 dapat dilihat jumlah responden laki laki sebanyak 10 orang atau 53% dan jumlah responden perempuan berjumlah 8 orang atau 47 %. Hal ini menunjukkan mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki.

3. Tingkat Pendidikan

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada penelitian ini terdapat juga identitas tingkat pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokkan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5 Identitas Responden Narasumber (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Camat dan Dinas PU Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	-	-
4	Diploma	1	17%
5	Sarjana	5	83%
	Jumlah	6	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel V.5 diatas, dapat kita lihat tingkat pendidikan responden yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Camat dan Dinas PU berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden yakni sebanyak 1 orang atau setara 17% merupakan lulusan Diploma dan sebanyak 5 orang atau setara 83% merupakan lulusan Sarjana. Jadi tingkat responden dari Narasumber (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Camat dan Dinas PU yang paling banyak yaitu berada pada tingkat lulusan Sarjana.

Tabel V.6 Identitas Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	4	24%
4	Diploma	6	35%
5	Sarjana	7	41%
Jumlah		17	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel V.6 diatas, dapat kita lihat tingkat pendidikan responden berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden yakni sebanyak 4 orang atau 24% merupakan lulusan SLTA, kemudian sebanyak 6 orang atau setara 35% merupakan lulusan Diploma dan sebanyak 7 orang atau setara

41% merupakan lulusan Sarjana. Jadi tingkat responden yang paling banyak yaitu berada pada tingkat lulusan Sarjana.

B. Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Evaluasi pada prinsipnya proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil seharusnya dicapai. Evaluasi merupakan suatu proses yang sangat penting karena:

- a. Dengan adanya evaluasi, dapat memberikan data atau informasi bagi pengambil keputusan, sehingga dapat membuat suatu program menjadi lebih baik.
- b. Untuk menilai apakah program yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai.
- c. Untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi pada penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.
- d. Untuk menilai apakah kegiatan yang telah dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan dari penelitian, peneliti menggunakan teori Sondang P. Siagian sebagai pedoman atau instrumen dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa indikator diantaranya :

1. Input (Masukan)

Dalam melakukan evaluasi maka harus adanya Input (masukan) yang mana input ini berguna sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan suatu evaluasi yang dapat menentukan jalannya suatu proses evaluasi.

Input (masukan) didalam evaluasi pelaksanaan adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan, yang mana input ini berguna sebagai faktor pendukung di dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru yang berjumlah 4 orang terhadap indikator Input (Masukan) dapat dilihat pada tabel V.7.

Tabel V.7 Distribusi Tanggapan Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Camat dan Dinas PU Mengenai Indikator Input (Masukan) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Kejelasan narasumber dalam pelaksanaan musrenbang.	4 (67%)	2 (33%)	-	6 (100%)
1	2	3	4	5	6
2	Pihak yang di undang dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang.	4 (67%)	2 (33%)	-	6 (100%)
3	Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan musrenbang	3 (50%)	3 (50%)	-	6 (100%)
Jumlah		11	7	-	18
Rata-rata		4	2	-	6

	(67%)	(33%)		(100%)
--	-------	-------	--	--------

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

Dari tabel V.7 diatas dapat kita ketahui bahwa pendapat dari 6 responden untuk indikator pertama mengenai Kejelasan Narasumber dalam Pelaksanaan Musrenbang responden yang menjawab Terlaksana berjumlah 4 orang, yang menjawab cukup Cukup Terlaksana 2 orang dan tidak ada responden yang menjawab Kurang Terlaksananya. Untuk item penilaian kedua mengenai Pihak yang di Undang dalam Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang responden yang menjawab Terlaksana berjumlah 4 orang, yang menjawab Cukup Terlaksana berjumlah 2 orang dan tidak ada responden yang menjawab Kurang Terlaksana. Untuk item penilaian ketiga mengenai Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Musrenbang responden yang menjawab Terlaksana berjumlah 3 orang, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 3 orang dan tidak ada responden yang menjawab Kurang Terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang berjumlah 17 orang terhadap indikator Input (Masukan) dapat dilihat pada tabel V.7.

Tabel V.8 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 Mengenai Indikator Input (Masukan) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian	Jumlah
----	-------------------	--------------------	--------

		T	CT	KT	
1	Kejelasan narasumber dalam pelaksanaan musrenabang.	10 (57%)	4 (26%)	3 (17%)	17 (100%)
2	Pihak yang di undang dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang.	7 (44%)	6 (30%)	4 (26%)	17 (100%)
3	Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan musrenbang	12 (74%)	5 (26%)	-	17 (100%)
Jumlah		29	15	7	51
Rata-rata		10 (59%)	5 (29%)	2 (12)	17 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 17 orang responden. Pada item penilaian pertama mengenai Kejelasan narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang, responden yang menjawab Terlaksana berjumlah 10 orang, yang menjawab Cukup Terlaksana 4 orang dan responden yang menjawab Kurang Terlaksananya 3 orang. Untuk item penilaian kedua mengenai Pihak yang di Undang dalam Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang responden yang menjawab Terlaksana berjumlah 7 orang, yang menjawab Cukup Terlaksana berjumlah 6 orang dan responden yang menjawab Kurang Terlaksana 4 orang. Untuk item penilaian ketiga mengenai Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Musrenbang responden yang menjawab Terlaksana berjumlah 12 orang, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 5 orang dan tidak ada responden yang menjawab Kurang Terlaksana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018

tanggapan dari Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan mengenai indikator Input (Masukan) yaitu berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tampan (Bapak Nurhasminsyah Sstp., M.Si.) mengenai indikator Input (Masukan) dengan pertanyaan pertama, Apakah Bapak/Ibu merupakan bagian dari narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang? Dan pertanyaan kedua, apakah pihak-pihak yang berkaitan dengan musrenbang telah diundang untuk mengikuti serangkaian kegiatan dalam musrenbang?, Beliau menjawab:

“Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di dalam musrenbang kecamatan saya sebagai Camat merupakan narasumber didalam pelaksanaan Musrenbang tersebut, dan terkait dengan pihak yang diundang sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku tentang siapa saja yang diundang didalam pelaksanaan musrenbang ini”. (wawancara, Senin, 20 Januari 2020, 10.00 WIB).

Pertanyaan ketiga, Apakah di dalam pelaksanaan Musrenbang disediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan musrenbang? Beliau menjawab:

“ Didalam pelaksanaan kegiatan musrenbang tentu pihak penyelenggara musrenbang menyediakan sejumlah fasilitas untuk kelancaran kegiatan musrenbang, seperti tenda, kursi, meja, dan lain sebagainya. (wawancara, Senin, 20 Januari 2020, 10.00 WIB).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PU Binamarga (Bapak Eka Fajar S.Sos) mengenai indikator Input (Masukan) beliau berkata:

“Didalam pelaksanaan kegiatan musrenbang tentu ada yang namanya peserta musrenbang yang didalamnya terdiri dari narasumber dan pihak-pihak yang mewakili daerahnya untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing, didalam kegiatan musrenbang itu sendiri tentu disediakan suatu fasilitas untuk menunjang keberlangsungan kegiatan musrenbang tersebut, dimana fasilitas ini dibuat untuk kenyamanan dan

kelancaran kegiatan musrenbang yang dilaksanakan nantinya”. (Wawancara, Senin, 20 Januari 2020, 14.00 WIB).

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh para responden musrenbang baik melalui kuessioner maupun wawancara langsung dapat disimpulkan bahawa pada indikator pertama yaitu input, berada pada kategori Cukup Terlaksana yang mana pada ukuran penilaian berada pada angka 34% - 66%.

2. Proses

Selanjutnya evaluasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan tampan dapat di ukur pada indikator: Proses yang artinya adalah suatu rancangan kegiatan yang dilakukan untuk menjadi suatu keluaran (produk/jasa) dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Camat dan Dinas PU yang berjumlah 6 orang mengenai indikator Proses dapat dilihat pada tabel V.9.

Tabel V.9 Distribusi Tanggapan Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Camat dan Dinas PU Mengenai Indikator Proses Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	

1.	Melakukan kegiatan musrenbang berdasarkan regulasi yang ada	3 (50%)	3 (50%)	-	6 (100%)
2.	Menghargai semua pendapat partisipan musrenbang	4 (67%)	2 (33%)	-	6 (100%)
3.	Diskusi timbal balik dalam penetapan usulan prioritas	3 (50%)	3 (50%)	-	6 (100%)
Jumlah		10	8	-	18
Rata-rata		3 (50%)	3 (50%)	-	6 (100%)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020.

Berdasarkan dari tabel V.9 dapat dilihat bahwa terdapat 6 orang responden pada indikator Proses. Pada item penilaian pertama mengenai Melakukan musrenbang berdasarkan regulasi yang ada responden yang menjawab Terlaksana berjumlah 3 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 3 dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana. Adapun pada item penilaian kedua mengenai Menghargai semua pendapat partisipan responden yang menjawab terlaksana berjumlah 4 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 2 orang dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana. Dan pada item penilaian ketiga mengenai Adanya diskusi timbal balik responden yang menjawab Terlaksana 3 orang, yang menjawab cukup terlaksana 3 orang dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berjumlah 17 orang mengenai indikator Proses dapat dilihat pada tabel V.10.

Tabel V.10 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017 Mengenai Indikator Proses Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Melakukan kegiatan musrenbang berdasarkan regulasi yang ada	9 (53%)	6 (35%)	2 (12%)	17 (100%)
2.	Menghargai semua pendapat partisipan musrenbang	8 (47%)	6 (35%)	3 (18%)	17 (100%)
3.	Diskusi timbal balik dalam penetapan usulan prioritas	7 (41%)	7 (41%)	3 (18%)	17 (100%)
Jumlah		24	19	8	51
Rata-rata		8 (47%)	6 (35%)	3 (18%)	17 (100%)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020.

Berdasarkan dari tabel V.10 dapat dilihat bahwa terdapat 17 orang responden pada indikator Proses. Pada item penilaian pertama mengenai Melakukan musrenbang berdasarkan regulasi yang ada responden yang menjawab Terlaksana berjumlah 9 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 6 dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 2 orang. Adapun pada item penilaian kedua mengenai Menghargai semua pendapat partisipan responden yang menjawab terlaksana berjumlah 8 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 6 orang dan yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 3 orang. Dan pada item penilaian ketiga mengenai Adanya

diskusi timbal balik responden yang menjawab Terlaksana 7 orang, yang menjawab cukup terlaksana 7 orang dan yang menjawab kurang terlaksana 3 orang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari seluruh tanggapan baik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan mengenai indikator Proses yaitu berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Camat Tampan (Bapak Nurhasminsyah Sstp., M.Si.) mengenai indikator kedua Proses, apakah pelaksanaan kegiatan musrenbang sesuai dengan regulasi yang berlaku? Beliau menjawab:

“Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan (Musrenbang) pada dasarnya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dimana hal hal yang terkait dengan pelaksanaan musrenbang telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ” (Wawancara, Senin 20 Januari 2020, 10.00 WIB).

Pertanyaan kedua, Bagaimana respon bapak/ibu terkait dengan usulan yang diberikan masyarakat atau partisipan musrenbang? Beliau menjawab:

“Terkait dengan usulan yang diberikan masyarakat atau partisipan musrenbang, tentunya kami sebagai narasumber menampung beberapa usulan yang kami anggap penting terkait dengan apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, sehingga kami memilih apa yang kami anggap dibutuhkan masyarakat tetapi sesuai dengan persetujuan mereka yang hadir pada saat kegiatan musrenbang” (Wawancara, Senin 20 Januari 2020, 10.00 WIB).

Untuk mengetahui hasil dari wawancara dengan dinas PU Binamarga (Bapak Eka Fajar S.Sos) Indikator yang kedua yaitu proses, beliau berkata:

“Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pada dilakukan sesuai dengann Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan usulan usulan yang diberikan masyarakat diterima lalu kita lakukan penyeleksiana mengenai pembangunan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya.” (Senin, 20 Januari 2020).

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh para responden musrenbang baik melalui kuessioner maupun wawancara langsung dapat disimpulkan bahwa pada indikator kedua yaitu proses, berada pada kategori Cukup Terlaksana yang mana pada ukuran penilaian berada pada angka 33% - 66%.

3. Output (Keluaran)

Output atau Keluaran maksudnya adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan, apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Camat dan Dinas PU yang berjumlah 6 orang mengenai indikator Output (Keluran) dapat dilihat pada tabel V.11.

Tabel V.11 Distribusi Tanggapan Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Camat dan Dinas PU Mengenai Indikator Output (Keluaran) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Penetapan usulan prioritas berdasarkan yang dibutuhkan masyarakat	5 (83%)	1 (17%)	-	6 (100%)
2	Kepuasan terhadap usulan rencana program pembangunan	3 (50%)	3 (50%)	-	6 (100%)
3.	Kepuasan masyarakat terhadap penetapan usulan prioritas	3 (50%)	3 (50%)	-	6 (100%)
Jumlah		11	7	-	18
Rata-rata		4 (67%)	2 (33%)	-	6 (100%)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020.

Berdasarkan dari tabel V.11 dapat dilihat bahwa terdapat 6 orang responden pada indikator Output (Keluaran). Penetapan usulan prioritas berdasarkan yang dibutuhkan masyarakat responden yang menjawab Terlaksana berjumlah 5 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 1 orang dan tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana. Adapun pada item penilaian kedua mengenai Kepuasan terhadap usulan rencana program pembangunan responden yang menjawab terlaksana berjumlah 3 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 3 orang dan tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana. Dan pada item penilaian ketiga mengenai Kepuasan masyarakat terhadap penetapan usulan prioritas responden yang menjawab

terlaksana berjumlah 3 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 3 orang dan tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana.

Tabel V.12 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Mengenai Indikator Output (Keluaran) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Penetapan usulan prioritas berdasarkan yang dibutuhkan masyarakat	5 (29%)	8 (47%)	4 (24%)	17 (100%)
2	Kepuasan terhadap usulan rencana program pembangunan	6 (35%)	7 (41%)	4 (24%)	17 (100%)
3.	Kepuasan masyarakat terhadap penetapan usulan prioritas	7 (41%)	7 (41%)	3 (18%)	17 (100%)
Jumlah		18	22	11	51
Rata-rata		6 (35%)	7 (41%)	4 (24%)	17 (100%)

Sumber: Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan dari tabel V.12 dapat dilihat bahwa terdapat 17 orang responden pada indikator Output (Keluaran). Penetapan usulan prioritas berdasarkan yang dibutuhkan masyarakat responden yang menjawab Terlaksana berjumlah 5 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 8 orang dan responden yang menjawab kurang terlaksana 4 orang. Adapun pada item penilaian kedua mengenai Kepuasan terhadap usulan rencana program pembangunan responden yang menjawab terlaksana berjumlah

6 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 7 orang dan responden yang menjawab kurang terlaksana 4 orang. Dan pada item penilaian ketiga mengenai Kepuasan masyarakat terhadap penetapan usulan prioritas responden yang menjawab terlaksana berjumlah 7 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 7 orang dan responden yang menjawab kurang terlaksana 3 orang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari seluruh tanggapan baik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan mengenai indikator Output (Keluaran) yaitu berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Camat Tampan (Bapak Nurhasminsyah Sstp., M.Si.) mengenai indikator Output (Keluaran) dengan pertanyaan pertama, Apakah usulan prioritas yang ditetapkan berdasarkan yang dibutuhkan masyarakat? Beliau menjawab:

“Pasti dalam segala usulan tentunya diberikan langsung oleh masyarakat, yang mana usulan tersebut kami tampung lalu kami diskusikan kembali usulan mana yang akan menjai usulan prioritas, dan itu juga berdasarkan persetujuan masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang” (Wawancara, Senin 20 Januari 2020, 10.00 WIB).

Pertanyaan kedua, Apakah ada masyarakat (partisipan musrenbang) yang tidak puas dengan usulan rencana program pembangunan? Beliau menjawab:

“Ada beberapa masyarakat yang mengikuti jalannya musrenbang mereka tidak setuju dengan usulan program pembangunan yang ada, karena diadrasah

mereka pembangunan yang dibutuhkan berbeda dengan apa yang diusulkan, akan tetapi ini bukan keputusan final program pembangunan yang akan dilakukan, sehingga kami selaku penyelenggara musrenbang menerima usulan yang mereka berikan untuk daerahnya dan dirembukkan lagi ” (Wawancara, Senin 20 Januari 2020, 10.00 WIB).

Untuk mengetahui hasil dari jawaban responden Dinas PU Binamarga (Bapak Eka Fajar S.Sos) mengenai indikator ketiga yaitu Output (Keluaran) beliau menjawab:

“Suatu usulan prioritas yang ada merupakan usulan yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri, dikarenakan usulan usulan yang diberikan itu diberikan langsung oleh masyarakat itu sendiri, akan tetapi didalam suatu diskusi kelompok perbedaan pendapat itu wajar dimana ada yang setuju dan tidak setuju, pembangunan yang akan menjadi prioritas pembangunan adalah pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga penetapan usulan pembangunan juga berdasrakan keputusan bersama. ” (Wawancara Senin 20 Januari 2020).

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh para responden musrenbang baik melalui kuessioner maupun wawancara langsung dapat disimpulkan bahwa pada indikator ketiga yaitu output, berada pada kategori Cukup Terlaksana yang mana pada ukuran penilaian berada pada angka 33% - 66%.

4. Outcome (Dampak)

Outcome (Dampak) maksudnya adalah apakah suatu pelaksanaan kegiatan berdampak nyata dengan kelompok sasaran dengan tujuan kegiatan. Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru yang berjumlah 4 orang mengenai indikator Outcome (Dampak) dapat dilihat pada tabel V.11.

Tabel V.13 Distribusi Tanggapan Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota, Camat dan Dinas PU Pekanbaru Mengenai Indikator Outcome (Dampak) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan musrenbang	4 (67%)	2 (33%)	-	6 (100%)
2	Pengaruh program kegiatan terhadap masyarakat	2 (33%)	4 (67%)	-	6 (100%)
3.	Kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan musrenbang	3 (50%)	3 (50%)	-	6 (100%)
Jumlah		9	9	-	18
Rata-rata		3 (50%)	3 (50%)	-	6 (100%)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020.

Berdasarkan dari tabel V.13 dapat dilihat bahwa terdapat 6 orang responden pada indikator Outcome (Dampak). Tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan musrenbang responden yang menjawab Terlaksana berjumlah 4 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 2 orang dan tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana. Adapun pada item penilaian kedua mengenai Pengaruh program kegiatan terhadap masyarakat responden yang menjawab terlaksana berjumlah 2 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 4 orang dan tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana. Dan pada item penilaian ketiga mengenai Kepuasan masyarakat

terhadap pelaksanaan kegiatan musrenbang responden yang menjawab terlaksana berjumlah 3 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 3 orang dan tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana.

Tabel V.14 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Mengenai Indikator Outcome (Dampak) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan musrenbang	7 (41%)	8 (47%)	2 (12%)	17 (100%)
2	Pengaruh program kegiatan terhadap masyarakat	4 (24%)	8 (47%)	5 (29%)	17 (100%)
3.	Kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan musrenbang	4 (24%)	9 (52%)	4 (24%)	17 (100%)
Jumlah		15	25	11	51
Rata-rata		5 (29%)	8 (47%)	4 (24%)	17 (100%)

Berdasarkan dari tabel V.14 dapat dilihat bahwa terdapat 17 orang responden pada indikator Outcome (Dampak). Tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan musrenbang responden yang menjawab Terlaksana berjumlah 7 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 8 orang dan responden yang menjawab kurang terlaksana 2 orang. Adapun pada item penilaian kedua mengenai Pengaruh program kegiatan

terhadap masyarakat responden yang menjawab terlaksana berjumlah 4 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 8 orang dan responden yang menjawab kurang terlaksana 5 orang. Dan pada item penilaian ketiga mengenai Kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan musrenbang responden yang menjawab terlaksana berjumlah 4 orang, yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 9 orang dan responden yang menjawab kurang terlaksana 4 orang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari seluruh tanggapan baik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan mengenai indikator Outcome (Dampak) yaitu berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Camat Tampan (Bapak Nurhasminsyah Sstp., M.Si.) mengenai indikator Outcome (Dampak) dengan pertanyaan pertama, Apakah tujuan pelaksanaan musrenbang telah tercapai? Beliau menjawab:

“Keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri, jika masyarakat merasa kegiatan musrenbang yang dilakukan dan pembangunan yang akan dilakukan sesuai yang mereka harapkan selama ini, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan kegiatan telah menapai tujuan yang ditetapkan” (Wawancara, Senin 20 Januari 2020, 10.00 WIB).

Pertanyaan kedua, Apakah manfaat dari diadakannya musrenbang bagi masyarakat ? Beliau menjawab:

“Dengan diadakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masyarakat dapat menyampaikan keresahan-keresahan terhadap masalah pembangunan yang ada di tiap-tiap daerahnya, sehingga secara tidak langsung diadakannya musrenbang dapat meminimalisir masalah pembangunan yang ada di lingkungan mereka, khususnya kecamatan tampan.” (Wawancara, Senin 20 Januari 2020, 10.00 WIB).

Untuk mengetahui hasil dari jawaban responden Dinas PU Bina Marga (Bapak Eka Fajar S.Sos) mengenai indikator ke-empat yaitu Outcome (dampak) beliau menjawab:

“Keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri, jika masyarakat merasa kegiatan musrenbang yang dilakukan dan pembangunan yang akan dilakukan sesuai yang mereka harapkan selama ini, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan kegiatan telah menapai tujuan yang ditetapkan” (Wawancara, Senin 20 Januari 2020, 14.00 WIB).

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh para responden musrenbang baik melalui kuessioner maupun wawancara langsung dapat disimpulkan bahwa pada indikator ke-empat yaitu outcome, berada pada kategori Cukup Terlaksana yang mana pada ukuran penilaian berada pada angka 33% - 66%.

C. Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018

Rekapitulasi ini berguna untuk membantu peneliti untuk menilai dari keseluruhan indikator yaitu : Input, Proses, Output dan Outcome, apakah Pelaksanaan

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sudah berjalan dengan baik atau belum.

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini:

Tabel V.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, Camat dan Dinas PU Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018

No.	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Input (Masukan)	4 (67%)	2 (33%)	-	6 (100%)
2	Proses	3 (50%)	3 (50%)	-	6 (100%)
3	Output (Keluaran)	4 (67%)	2 (33%)	-	6 (100%)
4	Outcome (Dampak)	3 (50%)	3 (50%)	-	6 (100%)
Jumlah		14	10	-	24 (100%)
Rata-rata		3 (50%)	3 (50%)	-	6 (100%)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pendapat dari 6 responden untuk indikator pertama, yaitu input yang menjawab terlaksana 4 orang dengan persentase 67%, Cukup terlaksana 2 orang dengan persentase 33%.

Untuk indikator yang kedua yaitu Proses yang menjawab terlaksana 3 orang dengan persentase 50%, Cukup terlaksana 3 orang dengan persentase 50%.

Sedangkan pada indikator ketiga yaitu Output yang menjawab terlaksana 4 orang dengan persentase 67%, Cukup terlaksana 2 orang dengan persentase 33%.

Dan untuk indikator yang ke-empat yaitu Outcome yang menjawab terlaksana 3 orang dengan persentase 50%, Cukup terlaksana 3 orang dengan persentase 50%.

Hasil dari keseluruhan indikator berada pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan Persentase 50%. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan berada pada kategori 33%-66% atau “Cukup Terlaksana”.

Tabel V.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekanbaru Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018.

No.	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Input (Masukan)	10 (59%)	5 (29%)	2 (12%)	17 (100%)
1	2	3	4	5	6
2	Proses	8 (47%)	6 (35%)	3 (18%)	17 (100%)
3	Output (Keluaran)	6 (35%)	7 (41%)	4 (24%)	17 (100%)
4	Outcome (Dampak)	5 (29%)	8 (47%)	4 (24%)	17 (100%)
Jumlah		29	26	13	68

				(100%)
Rata-rata	7 (41%)	7 (41%)	3 (18%)	17 (100%)

Berdasarkan tabel V.16 diatas diketahui bahwa pendapat dari 17 responden untuk indikator pertama, yaitu input yang menjawab terlaksana 10 orang dengan persentase 59%, Cukup terlaksana 5 orang dengan persentase 29% dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 12%.

Untuk indikator yang kedua yaitu Proses yang menjawab terlaksana 8 orang dengan persentase 47%, Cukup terlaksana 6 orang dengan persentase 35% dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 18%.

Sedangkan pada indikator ketiga yaitu Output yang menjawab terlaksana 6 orang dengan persentase 35%, Cukup terlaksana 7 orang dengan persentase 41% dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 orang dengan persentase 24%.

Dan untuk indikator yang ke-empat yaitu Outcome yang menjawab terlaksana 5 orang dengan persentase 29%, Cukup terlaksana 8 orang dengan persentase 47% dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 orang dengan persentase 24%.

Dari data dan penjelasan diatas, peneliti menarik sebuah kesimpulan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 adalah “Cukup Terlaksana” dengan mempertimbangkan 4 indikator yang telah diukur yaitu input, proses, output, dan outcome. Maka diharapkan kepada pelaksana kegiatan Musrenbang lebih

meningkatkan kualitas dari pelaksanaan kegiatan Musrenbang ini, agar pelaksanaan kegiatan ini menjadi lebih baik dan dapat memaksimalkan forum musyawarah ini mengenai masalah pembangunan yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018, bahwa masih ada beberapa pihak yang seharusnya diundang akan tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan musrenbang yang dilakukan, dan akan tetapi beberapa pihak yang telah diundang untuk menghadiri kegiatan pelaksanaan musrenbang tetapi tidak hadir untuk memenuhi undangan yang diberikan, dan masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini. Dan juga masih minimnya partisipasi masyarakat itu sendiri hal ini dapat dikarenakan kurangnya edukasi yang diberikan oleh pihak-pihak penyelenggara dalam kegiatan musrenbang ini sehingga beberapa atau untuk sebagian orang tidak mengetahui apa itu musrenbang. Selanjutnya ada beberapa pembangunan-pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga menyebabkan minimnya tingkat kepuasan masyarakat, dan pembangunan-pembangunan yang ada di kecamatan tampan hanyalah sebatas pembangunan-pembangunan fisik saja, dan tidak adanya pembangunan non fisik. Usulan-usulan yang diberikan pada tiap tahunnya cenderung sama dengan usulan usulan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwanya Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih belum optimal dimana

masih banyak ke kurangan kekurang pada pelaksanaan kegiatan ini sehingga diharapkan kepada pihak penyelenggara musrenbang dapat meningkatkan kualitas dari kegiatan Musrenbang tersebut khususnya di Kecamatan Tampan

D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang dilakukan berhubungan dengan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, ditemukan beberapa hambatan., antara lain :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan musrenbang. Yang mana kegiatan ini dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi yang dilakukan masyarakat daerah sekitar pelaksanaan musrenbang itu sendiri.
2. Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan musrenbang yang dilakukan. Yang mana hal ini diakibatkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan baik dari pihak kecamatan maupun pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan ini.
3. Keputusan keputusan yang dilakukan pihak penyelenggara musrenbang masih terdapat keputusan sepihak yang dilakukan, sehingga tidak tercapai kepuasan mengenai kegiatan musrenbang dan kepuasan penetapan pembangunan.
4. Sumberdaya daya manusia yang masih kurang baik, sehingga kegiatan musrenbang masih belum optimal.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru Tahun 2018, maka dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut

:

Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan optimal, dikarenakan didalam kegiatan Musrenbang yang terdapat pada beberapa indikator yaitu Input, proses, output, dan outcome berada pada kategori “Cukup Terlaksana” yang mana hal ini tidak berada pada kategori “Terlaksana” yang dikarenakan belum terlaksananya dengan baik kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mana masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan musrenbang tersebut. Yang mana masyarakat merasa bahwa pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mana pihak penyelenggara musrenbang tidak dapat menjangkau semua usulan pembangunan dikarenakan bertentangan dengan prioritas pembangunan, terbatasnya jumlah anggaran sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan musrenbang, sehingga masih minimnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatan musrenbang kepada masyarakat, yang mana hal ini berguna untuk mengedukasi masyarakat mengenai kegiatan musrenbang ini agar partisipasi masyarakat lebih meningkat terhadap kegiatan musrenbang tersebut.
2. Keputusan-keputusan yang diambil mengenai pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan dapat melibatkan masyarakat, yang mana pembangunan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
3. Meningkatkan fasilitas kegiatan Musrenbang sehingga peserta musrenbang merasa nyaman, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang khususnya di Kecamatan Tampan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Jakarta, Rineka Cipta.

Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta, Pustaka Jogja Mandiri.

Badriyah, Mila. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung, Pustaka Setia.

Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.

Gitosudarmo. 2000. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta, BPFE.

Griapon, Alexander dan Subandriyo. 2014. *Panduan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan*. Jayapura, Community Development.

Gomes, Cardoso, Faustino. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Andi.

Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Yogyakarta, Multi Grafindo.

Hamim, Sufian. 2003. *Sistem Perencanaan Strategis dalam Pembangunan*. Pekanbaru, UIR Press.

Harahap, Syafri Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta, Quantum.

Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta, Gaung Persada Pres.

Irene, Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Reksohadiprodjo, Sukanto. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta, BPFE UGM.

Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung, Alfabeta.

Siagian, Sondang P. 2017. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, Bumi Aksara.

Siagian, Sondang P. 2007. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Gunung Agung.

Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta, Sebelas Maaret University Press.

Supriyadi, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta, SUN.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Erlangga.

Terry, dan Leslie. W Rue. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.

Usaman, Husaini. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta, Raja Grafindo.

Winardi. 2000. *Azas-Azas Manajemen*. Bandung, Mandar Maju.

W,J,S, Poerwaarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pusaka.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

Zulkifli, Moris A. Yogya. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Dokumentasi:

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional